

EDISI
MARET - APRIL 2026
TAHUN XVIII.



CAPAIAN MAKRO
PEMBANGUNAN POSITIF
UPAYA PENGUATAN
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
TETAP DIBUTUHKAN



WAKIL KETUA DPRD SUMBAR
M. IQRA CHISSA PUTRA:
KOPERASI DAN UMKM BENTENG
EKONOMI RAKYAT



MIMBAR

DPRD SUMATERA BARAT // ASPIRATIF - RESPONSIF - INOVATIF



MENGAWASI KINERJA MENGAWAL PEMBANGUNAN DPRD SUMBAR KUPAS LKPJ KEPALA DAERAH TAHUN 2025



BAMUS SUSUN AGENDA MASA
SIDANG KEDUA 2025/2026
MUHIDI: KUNCI OPTIMALISASI FUNGSI DPRD



GENCARKAN SOSIALUSASI
PAJAK AIR PERMUKAAN,
EVI YANDRI KE DHARMASRAYA



KETUA DPRD SUMBAR MUHIDI:
RKPD SUMBAR 2027 MENUNTUT
KECERMATAN DAN KEBERANIAN BERINOVASI

Pengantar Redaksi

Majalah MIMBAR kembali hadir di tangan pembaca. Kali ini, pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2025 diangkat sebagai isu Utama mengingat pentingnya posisi LKPJ dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bagi pemerintah daerah, LKPJ disampaikan sebagai wujud dari transparansi dan akuntabilitas, sekaligus untuk mendapatkan rekomendasi berupa saran dan masukan untuk perbaikan kinerja. Sementara bagi DPRD sendiri, LKPJ adalah sebagai instrumen bagi pelaksanaan fungsi yang dimiliki, wadah untuk menilai kinerja bersama karena pemerintah daerah dan DPRD merupakan satu kesatuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Melalui panitia khusus, DPRD Sumatera Barat mencermati secara detail LKPJ Kepala Daerah Tahun 2025. Selain itu, komisi-komisi juga melakukan pembahasan bersama Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) mitra kerja masing-masing. Kegiatan itu dirangkum untuk disajikan sebagai Laporan Utama MIMBAR edisi kali ini.

Selain pembahasan LKPJ Kepala Daerah, Redaksi juga menghimpun berbagai kegiatan kedewanan lainnya selama dua bulan ini untuk disajikan ke ruang pembaca. Antara lain, melaksanakan kunjungan ke daerah pemilihan masing-masing selama masa reses, sosialisasi beberapa peraturan daerah, dan sebagainya.

Pada masa reses, anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melakukan kunjungan ke daerah pemilihan masing-masing untuk menghimpun aspirasi masyarakat yang diwakili untuk kemudian dibahas untuk dimasukkan ke dalam program pembangunan daerah. Anggota DPRD juga melakukan sosialisasi beberapa peraturan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk hukum daerah sehingga memberikan dampak manfaat kepada kesejahteraan masyarakat.

DPRD juga melakukan kunjungan ke berbagai kabupaten/ kota untuk meninjau program pembangunan yang telah dilaksanakan. Baik peninjauan sarana infrastruktur, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. DPRD juga mengawal pengelolaan berbagai potensi sumber pendapatan asli daerah (PAD) seperti pajak air permukaan, dan sebagainya untuk mencukupi kebutuhan anggaran pembangunan.

Menutup masa persidangan kedua tahun 2025/2026, DPRD menyampaikan kinerja dan laporan pelaksanaan kunjungan masa reses ke Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Melalui kunjungan masa reses, sangat banyak aspirasi pembangunan yang berhasil dihimpun dari masyarakat di 19 kabupaten/kota untuk dimasukkan ke dalam program pembangunan sehingga program dan kegiatan yang didanai APBD menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Redaksi berupaya menghimpun berbagai informasi kegiatan kedewanan tersebut untuk disajikan di dalam Majalah MIMBAR untuk dapat diketahui oleh masyarakat pembaca. Disebabkan keterbatasan ruang, tidak semua kegiatan itu dapat dirangkum di dalam edisi kali ini. Namun demikian, masyarakat juga bisa mengakses berbagai informasi DPRD Sumatera Barat melalui website <https://dprd.sumbarprov.go.id/>.

Demikian kata pembuka, tidak ada gading yang tak retak demikian juga dari sisi Redaksi yang tentunya memiliki kelemahan dan kekurangan. Untuk itu, Redaksi sangat terbuka untuk menerima kritik dan saran yang konstruktif demi penyajian informasi DPRD Provinsi Sumatera Barat yang lebih baik lagi di masa mendatang.

Selamat membaca!

Dahrul Idris, S.STP, M. Si
Pemimpin Redaksi



Susunan Redaksi
Mimbar DPRD Prov. Sumbar

Ketua:
Drs. H. Muhidi, MM

Wakil Ketua:
Evi Yandri Rajo Budiman, S.IP
Muhammad Iqra Chissa, S.ST. MM
Nanda Satria, S.IP

Penanggung Jawab:
Drs. Maifrizon, M. Si

Redaktur:
Dahrul Idris, S.STP

Penyunting/Editor:
Deny Suryani, S.IP

Fotografer:
Marjoni
Pendika Saputra

Sekretaris:
Arnelly Amran, S.Sos
Taharuddin
Supriyadi

Konsultan:
Padangmedia.com

Sekretariat Redaksi:
Humas DPRD
Provinsi Sumatera Barat
Jl. Khatib Sulaiman No. 87
Padang, Sumbar

Telp. (0751) 7057591 - 7057592 -
7057593
Fax: (0751) 7059328

Website:
<https://dprd.sumbarprov.go.id>



Sekapur Sirih

Drs. Maifrizon, M.Si

Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat terus berusaha mengoptimalkan kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi. Sepanjang bulan Maret dan April 2026 ini telah dilaksanakan sejumlah pelaksanaan fungsi penting, salah satunya terkait fungsi pengawasan dalam bentuk pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2025.

Pembahasan ini telah dilaksanakan secara komprehensif dan bertahap sesuai dengan tata tertib. Di antaranya pembahasan oleh komisi-komisi sesuai sektor masing-masing, pembahasan oleh panitia khusus (pansus) hingga penyampaian rekomendasi DPRD kepada pemerintah provinsi.

LKPJ kepala daerah amat penting karena merupakan wujud akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka memenuhi kewajibannya. Selain itu, rekomendasi DPRD terkait LKPJ tersebut juga tak kalah penting sebagai bahan untuk penyempurnaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Oleh karena itu, demi menghasilkan rekomendasi yang sesuai dengan kebutuhan percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di

Sumatera Barat, pansus LKPJ mengoptimalkan pembahasan dan tinjauan lapangan sebelum kemudian menyusun rekomendasi.

Selain itu, Bulan April menjadi penghujung masa persidangan kedua tahun 2025/2026 dan awal dari masa persidangan ketiga tahun 2026/2027 DPRD Sumatera Barat. Selama masa persidangan kedua tersebut selain fungsi pengawasan yang salah satunya berupa pembahasan LKPJ, DPRD juga melaksanakan fungsi lainnya dengan seoptimal mungkin.

Untuk fungsi pembentukan perda, selama masa persidangan kedua DPRD bersama pemerintah daerah telah membahas satu rancangan peraturan daerah (ranperda), yaitu Ranperda tentang Jasa Konstruksi. Kemudian, DPRD juga telah melakukan harmonisasi terhadap dua ranperda usul insiatif, yaitu Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Untuk pelaksanaan fungsi anggaran, DPRD Sumatera Barat telah melakukan serangkaian rapat dan kegiatan lapangan untuk pengoptimalan pendapatan asli daerah (PAD).

Pada masa reses persidangan kedua ini, DPRD telah pula menampung sejumlah aspirasi masyarakat melalui pertemuan langsung dengan masyarakat di seluruh kabupaten/kota. Kegiatan ini dilakukan seluruh pimpinan dan anggota dewan. Aspirasi yang ditampung tersebut ada yang berupa usulan baru, ada pula yang bersifat mengingatkan kembali usulan sebelumnya yang belum ditindaklanjuti dalam program pembangunan daerah pada masa persidangan pertama.

Aspirasi-aspirasi tersebut telah dihimpun Sekretariat DPRD dan diserahkan pada pemerintah provinsi agar dapat dimasukkan dalam program dan kegiatan pembangunan daerah.

Dengan telah usainya masa persidangan kedua, DPRD Sumatera Barat telah memasuki tahapan baru yakni masa persidangan ketiga tahun 2026/2027. Banyak target dan kerja yang menunggu diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Untuk mendukung dan menyokong pelaksanaan kinerja pimpinan dan seluruh anggota dewan, sekretariat DPRD bertekad pula untuk selalu meningkatkan kinerja.

Drs. Maifrizon, M.Si

Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat



Sambutan

Drs. H. MUHIDI, MM

Ketua DPRD
Provinsi Sumatera Barat

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, menjelang penutupan masa sidang kedua tahun 2025/2026 dan pembukaan masa sidang ketiga tahun 2026/2027, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat berhasil menuntaskan sejumlah agenda penting sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Paling Utama adalah pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2025. DPRD melalui panitia khusus berhasil menuntaskan pembahasan untuk kemudian menjadikan sejumlah catatan strategis sebagai rekomendasi kepada gubernur dan wakil gubernur untuk perbaikan kinerja pemerintahan daerah ke depan.

Bagi pemerintah daerah, menyampaikan LKPJ kepada DPRD merupakan amanah undang-undang sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas, sekaligus untuk mendapatkan rekomendasi berupa saran dan masukan untuk perbaikan kinerja. Sementara bagi DPRD sendiri, LKPJ menjadi instrumen penting bagi pelaksanaan fungsi yang dimiliki untuk menilai kinerja bersama karena pemerintah daerah dan DPRD merupakan satu kesatuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Melalui panitia khusus, DPRD Sumatera Barat mencermati secara detail LKPJ Kepala Daerah Tahun 2025. Selain itu, komisi-komisi juga melakukan pembahasan bersama Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) mitra kerja masing-masing. Pembahasan dilakukan secara mendalam untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah telah berjalan sesuai harapan dan sejauh mana telah memberikan dampak positif kepada kesejahteraan masyarakat.

Selain melalui pendalaman data dan materi, Pansus LKPJ juga melakukan peninjauan ke beberapa kabupaten/kota untuk memastikan ketesesuaian data yang disajikan dengan kondisi di lapangan. Sekaligus, untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, baik di sektor pendidikan, Kesehatan, pemberdayaan, juga dalam hal pengelolaan sumber pendapatan asli daerah. Hal itu sangat penting dilakukan dengan menginventarisir kendala dan kelemahan untuk dicarikan langkah-langkah strategis

untuk perbaikan dan penyempurnaan.

DPRD menyadari, keberhasilan pemerintah daerah juga merupakan keberhasilan DPRD, demikian juga sebaliknya, sebab DPRD Bersama pemerintah daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Untuk itu, pendalaman LKPJ perlu dilakukan untuk melahirkan rekomendasi strategis untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.

Selama masa persidangan kedua tahun 2025/2026, DPRD juga telah melaksanakan berbagai kegiatan yang telah diagendakan. Antara lain kunjungan ke daerah pemilihan masing-masing dalam masa istirahat bersidang, sosialisasi peraturan daerah kepada masyarakat, dan sebagainya.

Menutup masa persidangan kedua tahun 2025, DPRD Sumatera Barat telah menyampaikan laporan kinerja kepada gubernur sekaligus menyampaikan hasil kunjungan masa reses yang merupakan aspirasi masyarakat yang dijemput langsung oleh seluruh anggota dewan. Aspirasi tersebut diharapkan menjadi perhatian pemerintah daerah karena bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Baik aspirasi di bidang infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat.

Memasuki masa persidangan ketiga tahun 2026/2027 nanti, sejumlah agenda besar dan penting telah menunggu untuk dituntaskan, antara lain Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), pembahasan dan penetapan beberapa rancangan peraturan daerah, persiapan pembahasan perubahan KUA PPAS dan perubahan APBD tahun 2026, dan lainnya.

DPRD berharap seluruh agenda kegiatan tersebut dapat berjalan maksimal dengan didukung oleh seluruh pihak terkait. Dengan demikian, kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan akan semakin baik, percepatan pembangunan daerah bisa tercapai, perekonomian bisa bergerak lebih kencang, yang pada akhirnya tujuan untuk kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan.

Wassalam

Drs. Muhidi, MM
Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat



Mengawasi Kinerja Mengawal Pembangunan

DPRD Sumbar Kupas LKPJ Kepala Daerah Tahun 2025

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menyampaikan Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2025 dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Senin (16/3/2026). Penyampaian laporan tersebut sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Mahyeldi menyampaikan, LKPJ Kepala Daerah bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan wujud transparansi dan akuntabilitas gubernur dan wakil gubernur atas mandat yang diberikan rakyat. Segala capaian yang diraih sepanjang tahun 2025 adalah hasil sinergi kolektif antara pemerintah daerah, DPRD, Forkopimda, akademisi,

lembaga profesi, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, insan pers dan seluruh elemen masyarakat Sumatera Barat.

Mahyeldi menyampaikan, dinamika pembangunan senantiasa menghadirkan tantangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, melalui penyampaian LKPJ, dia berharap DPRD Provinsi Sumatera Barat dapat memberikan saran, masukan, rekomendasi, serta catatan strategis yang komprehensif sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.

Dia melanjutkan, tahun 2025 merupakan tahun transisi dalam perencanaan pembangunan daerah, yaitu masa peralihan dari pelaksanaan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021–2026 menuju penyusunan dan penetapan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2029. Dalam masa transisi tersebut, arah kebijakan pembangunan daerah pada tahun 2025 tetap berpedoman pada RPJMD tahun 2021–2026 sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah.

"Sebagaimana dirumuskan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan pembangunan daerah diarahkan melalui berbagai kebijakan, program, dan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan daya saing daerah, serta pembangunan yang

berkelanjutan," kata Mahyeldi.

Upaya tersebut dilaksanakan dengan tetap memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal, karakter masyarakat, serta keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pada akhirnya, seluruh proses pembangunan daerah bermuara pada peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pilar Utama kemajuan daerah.

"Peningkatan kualitas manusia Sumatera Barat menjadi landasan penting dalam penyusunan kebijakan, program,

dan penganggaran daerah, sehingga setiap alokasi dan pemanfaatan APBD diharapkan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat," katanya.

Mahyeldi melanjutkan, berbagai program dan kegiatan pembangunan telah dilaksanakan secara berkesinambungan dari tahun ke tahun, disertai dengan evaluasi terhadap capaian kinerja yang terus dilakukan sebagai bagian dari upaya peningkatan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hasil

pelaksanaan pembangunan tersebut secara berkala telah disampaikan kepada DPRD melalui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah dalam menjalankan amanah pembangunan.

"Dokumen LKPJ memuat gambaran menyeluruh mengenai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, kebijakan pengelolaan keuangan daerah, serta pelaksanaan tugas pembantuan," ujarnya. *

Capaian Makro Pembangunan Positif

Upaya Penguatan Kebijakan Pembangunan Tetap Dibutuhkan

Dalam rapat paripurna penyampaian Nota Pengantar LKPJ Kepala Daerah Tahun 2025 tersebut, Mahyeldi menekankan bahwa secara keseluruhan, capaian makro pembangunan di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025 menunjukkan arah yang positif. Meskipun demikian, masih diperlukan berbagai upaya penguatan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan merata, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Oleh karena itu, dalam perencanaan pembangunan ke depan diperlukan kebijakan yang tetap berupaya mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah melalui penguatan konektivitas wilayah, pembangunan infrastruktur dasar, serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan

ekonomi baru," kata Mahyeldi.

Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan, berdasarkan data Konsolidasi Bersih Semester II Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, bahwa jumlah penduduk Sumatera Barat tahun 2025 adalah sebesar 5.887.418 jiwa. Jumlah penduduk pada tahun 2025 dibandingkan tahun 2024 terjadi penambahan sebanyak 67.059 jiwa atau tumbuh sekitar 1,15 persen.

"Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk di Sumatera Barat masih berada pada dinamika kependudukan dalam tren pertumbuhan yang relatif terkendali dan menjadi faktor penting dalam perencanaan pembangunan daerah," ujarnya.

Mahyeldi merinci, secara spasial, pertumbuhan penduduk tahun 2025 menunjukkan variasi antar kabupaten/kota.

Pertumbuhan tertinggi tercatat di Kepulauan Mentawai sebesar 2,00 persen, diikuti oleh Pesisir Selatan sebesar 1,77 persen, serta Pasaman Barat sebesar 1,71 persen. Selain itu, Dharmasraya juga menunjukkan pertumbuhan cukup tinggi yaitu 1,61 persen.

"Tingginya pertumbuhan pada wilayah-wilayah tersebut mengindikasikan adanya dinamika perkembangan kawasan, baik dari sisi permukiman maupun aktivitas ekonomi," sebutnya.

Sementara itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 dan disusun berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yang taat asas, transparan, partisipatif, dan akuntabel, serta selaras dengan RKPD Tahun



2025 dan Prioritas Pembangunan Nasional. Penyusunan APBD juga memperhatikan prinsip *money follows program* dan penganggaran berbasis kinerja guna memastikan setiap rupiah belanja memberikan manfaat yang terukur bagi masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, terdapat dinamika yang mengharuskan dilakukan perubahan APBD. Dari sisi makro ekonomi, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat Tahun 2025 diasumsikan sebesar 5,05 persen, namun hingga Triwulan I terealisasi sebesar 4,66 persen. Inflasi juga mengalami kenaikan dari 0,30 persen pada Maret menjadi 2,38 persen pada April 2025.

"Kondisi tersebut berdampak pada penyesuaian kebijakan fiskal daerah agar tetap adaptif dan responsif. Langkah penyesuaian dilakukan dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal dan stabilitas kemampuan keuangan daerah," terangnya.

Perubahan APBD turut dipengaruhi oleh terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Kondisi itu mengakibatkan terjadinya penyesuaian alokasi transfer ke daerah, adanya tambahan DAU untuk pembayaran THR dan gaji ketiga belas guru ASN, dukungan pendanaan PSU Kabupaten Pasaman, serta program sekolah gratis.

Selain itu, lanjut Mahyeldi, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan sebesar Rp117,73 miliar lebih rendah dari estimasi awal Rp194,91 miliar sehingga perlu dilakukan penyesuaian dalam struktur pembiayaan.

Faktor yang mengharuskan pemerintah daerah untuk melakukan relokasi dan penyesuaian penjabaran APBD adalah karena di penghujung tahun 2025 terjadi bencana banjir bandang dan tanah longsor di hampir seluruh kabupaten/ kota. Penyesuaian tersebut dilakukan untuk mendukung penanganan darurat serta percepatan pemulihan pascabencana. Mahyeldi menegaskan, penyesuaian tersebut dilakukan secara selektif

dengan tetap memprioritaskan belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

"Secara umum, total pendapatan daerah setelah perubahan menjadi sekitar Rp6,26 triliun, sedangkan belanja daerah menjadi sekitar Rp6,38 triliun, dengan penyesuaian terutama pada belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, serta belanja transfer kepada kabupaten/kota," jelasnya.

Kebijakan fiskal Tahun 2025 tetap diarahkan pada penguatan kualitas belanja agar lebih produktif dan berdampak langsung kepada masyarakat, peningkatan kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, serta pengendalian defisit dalam batas kemampuan keuangan daerah. Selain itu, pemerintah daerah terus memperkuat sistem pengawasan internal, meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan, serta mendorong digitalisasi pengelolaan pendapatan daerah sebagai bagian dari reformasi tata kelola keuangan daerah. *

Orientasi Percepatan Pembangunan Daerah Hadapi Sejumlah Tantangan



Mahyeldi menyampaikan, orientasi pembangunan daerah tahun 2025 dihadapkan kepada dinamika dan sejumlah tantangan. Meski demikian, berbagai indikator capaian kinerja menunjukkan tren positif sebagai upaya bersama pemerintah daerah dan DPRD beserta seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dalam membuktikan komitmen kepada percepatan pembangunan daerah.

Ia menyampaikan, kinerja pada enam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, delapan belas urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, serta delapan urusan pemerintahan pilihan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menunjukkan capaian yang positif. Seluruh urusan tersebut dilaksanakan dengan

orientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan daya saing daerah, serta percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat.

"Berbagai indikator kinerja menunjukkan capaian yang positif, meskipun dalam pelaksanaannya tetap dihadapkan pada dinamika dan tantangan pembangunan yang terus berkembang. Capaian tersebut juga tercermin dari apresiasi dan penghargaan yang diterima Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, khususnya atas komitmen dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)," ujarnya.

Dia melanjutkan, dalam pelaksanaan pembangunan daerah masih terdapat kekurangan, keterbatasan, dan hal-hal yang memerlukan penyempurnaan. Hal itu menjadi bahan evaluasi bersama agar pada tahun-tahun mendatang pelaksanaan pembangunan

dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat. Berbagai target dan cita-cita pembangunan yang telah dirumuskan secara terencana merupakan komitmen bersama untuk mewujudkan kemajuan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat.

"Untuk itu, dukungan dan sinergi yang semakin kuat antara pemerintah daerah dan DPRD, instansi vertikal, BUMN dan BUMD, kalangan akademisi, dunia usaha, serta seluruh elemen masyarakat sangat diharapkan. Kolaborasi dan semangat kebersamaan merupakan kunci utama dalam menghadapi dinamika pembangunan yang semakin kompleks. Dengan komitmen, kerja keras, dan kebersamaan, kita optimis mampu mempercepat terwujudnya Sumatera Barat madani yang maju dan berkeadilan," tandasnya.

*

Tahun 2025 Masa Transisi di Tengah Tekanan Fiskal Daerah

Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Muhidi membuka rapat paripurna penyampaian Nota Pengantar LKPJ Kepala Daerah Tahun 2025 tersebut menegaskan, penyampaian LKPJ merupakan amanah undang-undang yang harus dilaksanakan oleh kepala daerah. Hal itu sebagai wujud dari penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sesuai dengan amanah undang-undang, DPRD dan kepala daerah berkedudukan sama sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Keberhasilan dan kegagalan merupakan tugas dan kewajiban bersama.

Muhidi menekankan, menjalankan fungsi pengawasan yang dimiliki DPRD, pembahasan LKPJ memiliki makna yang sangat strategis dan menjadi sarana untuk melakukan kontrol terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah.

Dia memaparkan, tahun 2025 merupakan tahun pertama kepemimpinan Mahyeldi-Vasko Ruseimy sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat. Di samping itu juga merupakan masa transisi sekaligus refleksi atas pencapaian visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026.

Meski demikian, tahun 2025 merupakan tahun yang sangat berat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. "Kita berada dalam situasi di mana terjadi guncangan berlapis dalam



menghadapi bencana," kata Muhidi.

Ia menerangkan, belum pulih penanganan bencana tahun 2024, datang lagi bencana pada akhir tahun 2025 yaitu bencana banjir bandang dan tanah longsor di hampir seluruh kabupaten/ kota. Tercatat 790 nagari/kelurahan/desa di 150 kecamatan pada 16 kabupaten/ kota dilanda banjir bandang dan tanah longsor.

"Kesulitan semakin kompleks karena semakin tertekannya fiskal daerah sebagai dampak dari kebijakan efisiensi pemerintah pusat yang menyebabkan menurunnya dana transfer ke daerah yang tentunya bukan kondisi yang mudah untuk ditangani," ujarnya.

Dia menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah di mana dalam kondisi tersebut, masih menunjukkan kinerja dan capaian yang positif. Tingkat kemiskinan berhasil diturunkan dari 5,42 persen pada 2024 menjadi 5,31 persen di 2025. Demikian juga tingkat pengangguran terbuka berhasil diturunkan dari 5,69 persen menjadi 5,52 persen.

"Namun tidak bisa dipungkiri terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi di mana tahun 2025 hanya tumbuh 3,37 persen, lebih rendah dibanding tahun 2024 yang sebesar 4,36 persen meski dapat dipahami karena banyak infrastruktur ekonomi yang rusak akibat bencana beruntun yang terjadi," jelasnya.

Untuk itu, lanjut Muhidi, LKPJ yang disampaikan akan dibahas secara lebih mendalam oleh DPRD melalui panitia khusus (Pansus). Selain itu juga melalui komisi-komisi yang akan mencermati kinerja OPD mitra kerja sesuai bidang tugas masing-masing.

Dia berharap, pembahasan LKPJ oleh DPRD dapat berjalan optimal untuk menyusun rekomendasi yang akan disampaikan kepada gubernur dalam rangka perbaikan terhadap kelemahan dan kendala yang terjadi. Meskipun rekomendasi tidak dalam kapasitas menerima atau menolak LKPJ, namun memiliki peran strategis untuk perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan. *

DPRD Sumbar Bentuk Pansus LKPJ Kepala Daerah Tahun 2025



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat membentuk panitia khusus (Pansus) untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2025. Pansus akan bekerja selama lebih kurang satu bulan untuk mengupas LKPJ dan menyusun rekomendasi DPRD.

Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Muhidi menegaskan, pembentukan Pansus untuk membahas LKPJ merupakan langkah optimalisasi yang diharapkan dapat melahirkan rekomendasi strategis DPRD untuk perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.

"Sesuai dengan amanah undang-undang, LKPJ yang disampaikan gubernur akan dibahas secara lebih mendalam. DPRD membentuk Pansus untuk mengoptimalkan pembahasan tersebut agar dapat melahirkan rekomendasi DPRD yang strategis dan konstruktif untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan," tegas Muhidi dalam rapat paripurna pembentukan Pansus LKPJ, Senin (16/3/2026).

Pembentukan Pansus tersebut dilakukan setelah mendengarkan Nota Pengantar LKPJ oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi dalam rapat paripurna tersebut. Menurut Muhidi, LKPJ akan dibahas lebih

dalam untuk mengetahui sejauh mana laporan yang disampaikan telah sesuai dengan pelaksanaan di lapangan, termasuk juga untuk mengetahui kendala yang dihadapi untuk mencari solusi demi peningkatan kinerja pemerintahan daerah di masa mendatang.

Pansus LKPJ Kepala Daerah Tahun 2025 DPRD Provinsi Sumatera Barat diketuai oleh Yogi Pratama, Wakil Ketua Verry Mulyadi dan Sekretaris Ilson Chong.

Muhidi menekankan, LKPJ tahun 2025 merupakan tahun pertama kepemimpinan Mahyeldi-Vasko Ruseimy sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, sekaligus masa transisi RPJMD 2021-2025 ke RPJMD 2026-2029. Dalam perjalanan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan selama satu tahun, dihadapkan kepada sejumlah tantangan yang cukup berat.

"Kondisi ini membutuhkan penanganan yang maksimal sekaligus menjadi pembelajaran untuk bekal menghadapi apabila kondisi yang sama di tahun-tahun berikutnya," ujarnya.

Muhidi menegaskan, DPRD akan bekerja secara maksimal menuntaskan pembahasan LKPJ untuk kemudian melahirkan rekomendasi strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan. Selain melalui Pansus, LKPJ juga akan dibahas oleh komisi-komisi bersama OPD mitra kerja masing-masing, termasuk juga melakukan peninjauan langsung ke daerah-daerah. *

Pansus LKPJ DPRD Sumbar Optimalkan Pembahasan dengan Tinjauan Lapangan

Untuk menghasilkan rekomendasi yang sesuai dengan kebutuhan percepatan pembangunan daerah, Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2025 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat mengoptimalkan pembahasan dan melakukan tinjauan lapangan.

Pansus LKPJ mengoptimalkan pembahasan melalui rapat intensif bersama perangkat daerah dan mengumpulkan rekomendasi dari komisi-komisi. Selain itu, juga melakukan peninjauan langsung ke lapangan, di antaranya peninjauan ke UPTD Ternak Ruminansia Air Runding dan pabrik pengering jagung - pengolahan pakan ternak di Pasaman Barat.

Pansus LKPJ juga melaksanakan peninjauan ke Samsat Pariaman dan Stadion Utama Sumbar. Kunjungan ke stadion utama dilakukan untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Anggota Pansus LKPJ, Irsyad Safar mengatakan, peninjauan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah, khususnya proyek strategis di sektor olahraga.

"Kunjungan Pansus LKPJ ini dilakukan untuk memastikan progres pembangunan Stadion Utama Sumbar berjalan sesuai rencana dan mampu memberikan manfaat optimal



bagi masyarakat," ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas dalam tahap penyelesaian pembangunan serta pengelolaan stadion secara profesional. Menurutnya, hal tersebut menjadi kunci agar stadion tidak hanya selesai secara fisik, tetapi juga berfungsi maksimal sebagai pusat kegiatan olahraga dan kebanggaan daerah.

"Ke depan, kita berharap adanya peningkatan kualitas penyelesaian serta pengelolaan yang profesional agar stadion ini benar-benar menjadi kebanggaan Sumbar," tambahnya.

Melalui kunjungan itu, Pansus LKPJ berkomitmen untuk terus mengawal pembangunan agar berjalan efektif, transparan, dan tepat sasaran, sekaligus memastikan keberadaan stadion mampu mendorong kemajuan olahraga serta pertumbuhan ekonomi daerah.

Kemudian kunjungan ke UPTD Ternak Ruminansia Air Runding di Pasaman Barat menjadi bagian penting dalam memastikan program peternakan berjalan optimal dan tepat sasaran.

Begitu pula dengan

peninjauan ke pabrik pengering jagung dan pengolahan pakan ternak di Kecamatan Kinali, yang juga merupakan bagian dari upaya untuk mendorong peningkatan sektor pertanian dan peternakan sebagai salah satu pilar utama perekonomian daerah.

Sementara itu, kunjungan ke Samsat Pariaman bertujuan untuk meninjau secara langsung capaian kinerja, kualitas pelayanan publik, serta optimalisasi penerimaan pajak daerah. Melalui kunjungan itu, diharapkan dapat teridentifikasi berbagai kendala dan tantangan di lapangan, sekaligus mendorong peningkatan transparansi, akuntabilitas dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.

"Peninjauan pansus ke sejumlah lokasi ini berguna untuk menggali data dan fakta di lapangan guna menyusun rekomendasi yang lebih konkret, teknis dan aplikatif," ujarnya.

Dalam pembahasannya, pansus tidak hanya berfokus pada evaluasi pelaksanaan program yang telah berjalan saja, namun juga menyusun rekomendasi yang akan menjadi salah satu dasar dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran yang lebih efektif untuk tahun berikutnya. *

DPRD Ingatkan Rekomendasi Ditindaklanjuti Serius



Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Muhidi mengingatkan dengan tegas kepada gubernur dan wakil gubernur berikut jajaran pemerintah provinsi untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2025.

Hal itu diingatkan Muhidi dalam rapat paripurna beragendakan penyampaian rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun 2025, Selasa (28/4/2026).

"Meskipun rekomendasi tidak dalam kapasitas menerima atau menolak laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah, namun kami mengingatkan untuk ditindaklanjuti oleh gubernur dan wakil gubernur karena memuat

masukan dan saran yang strategis untuk perbaikan kinerja pemerintah daerah ke depan," tegas Muhidi.

Muhidi menambahkan, pelaksanaan rekomendasi tersebut hendaknya disampaikan kembali ke DPRD secara berkala sekali dalam enam bulan sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah. DPRD melalui komisi-komisi juga akan mengawal pelaksanaan rekomendasi melalui OPD mitra kerja masing-masing untuk memastikan rekomendasi LKPJ tahun 2025 dan rekomendasi tahun-tahun sebelumnya benar-benar dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

"Pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi ini tidak hanya berupa tindakan normatif, akan tetapi betul-betul ditindaklanjuti

secara konkret, agar permasalahan yang sama tidak terulang Kembali di masa yang akan datang," tegas Muhidi.

Dalam kesempatan itu, Muhidi menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah di mana dalam kondisi yang sulit masih bisa meraih capaian yang cukup baik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Baik dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan, pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan serta tindak lanjut terhadap pelaksanaan rekomendasi DPRD tahun sebelumnya.

Meski demikian, DPRD melihat masih ada beberapa kelemahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu menjadi perhatian dan perbaikan ke depan. Muhidi merinci, diantaranya tata kelola keuangan daerah yang belum visibel, dimana target pendapatan tidak tercapai dan cukup banyak kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan. Demikian juga dengan pelaksanaan program dan kegiatan pada beberapa urusan, di antaranya urusan pendidikan, pekerjaan umum, ESDM, pertanian, pariwisata serta beberapa urusan lainnya.

"Memperhatikan hal tersebut, maka rekomendasi yang diberikan DPRD hendaknya ditindaklanjuti oleh gubernur beserta jajaran pemerintah daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan," tandasnya. *

Vasko Ruseimy Tegaskan Rekomendasi DPRD Landasan Penting Perbaikan Kinerja



Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy menegaskan, rekomendasi DPRD terhadap LKJP merupakan kontribusi penting bagi pemerintah daerah sekaligus sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab bersama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Hal itu ditegaskan Vasko dalam rapat paripurna DPRD Sumatera Barat dengan agenda penyerahan Rekomendasi DPRD terhadap LKJP Kepala Daerah Tahun 2025, Selasa (28/4/2026).

"Rekomendasi tersebut kami pandang sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab bersama, sekaligus menjadi landasan penting dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat dan strategis demi peningkatan kesejahteraan masyarakat di masa yang akan datang. Kami berharap dukungan

yang diberikan tidak hanya terwujud dalam forum rapat paripurna ini, tetapi juga terus berlanjut dalam pelaksanaan program-program pembangunan berikutnya," kata Vasko.

Dia melanjutkan, rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD menjadi perhatian utama dan akan ditindaklanjuti melalui berbagai langkah penyempurnaan sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan pembangunan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyambut dengan baik catatan strategis, saran, serta masukan yang disampaikan oleh DPRD terhadap LKJP Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 tersebut.

Rekomendasi tersebut mencerminkan perhatian yang besar terhadap kinerja pemerintah daerah, sekaligus menjadi bentuk dukungan dan partisipasi aktif DPRD dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Atas dasar itu, ia menyatakan, seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan saran dan masukan yang telah disampaikan.

Dia juga berharap, dalam melakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi yang telah diberikan, DPRD senantiasa memberikan perhatian dan penguatan melalui fungsi pengawasan, sehingga pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi tersebut dapat berjalan dengan baik. Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD diyakini merupakan salah satu kunci utama dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan daerah. *



Wakil Ketua DPRD Sumbar M. Iqra Chissa Putra:

Koperasi dan UMKM Benteng Ekonomi Rakyat

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Muhammad Iqra Chissa Putra menyatakan, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan benteng perekonomian rakyat. Untuk itu sudah semestinya koperasi dan UMKM menjadi perhatian terutama dalam memberikan perlindungan dan pembinaan agar mampu berkembang dan mandiri.

Hal itu ditegaskan Iqra Chissa saat sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan UMKM di Kecamatan Pauh, Kota Padang, Kamis (12/3/2026).

"Koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah merupakan benteng perekonomian rakyat, ini harus dilindungi, diberdayakan, dan terus dibina untuk penguatannya agar mampu berkembang dan mandiri," kata Iqra.

Dalam upaya memberikan perlindungan dan pemberdayaan tersebut, lanjutnya, Pemprov Bersama DPRD Sumatera Barat telah membuat regulasi yang bertujuan agar koperasi dan UMKM mampu, mandiri, dan berdaya saing.

"Sosialisasi Perda ini dimaksudkan untuk memperkuat pemahaman masyarakat terhadap produk hukum daerah yang berkaitan dengan perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM," katanya.

Dia menyebutkan, dengan adanya perda tersebut, pemerintah daerah memiliki payung hukum untuk melaksanakan berbagai program kegiatan terkait perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM. Dengan demikian, diharapkan dapat membantu koperasi dan pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya hingga menjadi kuat dan mampu bersaing.

Menurut Iqra, beberapa dasar pemikiran yang menjadi latar belakang lahirnya Perda

Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM adalah untuk memperkuat peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Demikian juga, bagi pelaku UMKM adalah untuk meningkatkan kemampuan dalam menjalankan usahanya sehingga mandiri dan berdaya saing.

Selain itu, perda tersebut juga memuat tentang bantuan akses permodalan UMKM dari bank dan lembaga pembiayaan lainnya, meningkatkan kualitas produk, memfasilitasi pemasaran, dan sebagainya. Perda juga memuat tentang penguata sumber daya manusia koperasi dan UMKM, manajemen usaha, dan sebagainya.

"Jika koperasi dan UMKM berkembang dengan baik maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat, pengangguran berkurang, lapangan kerja terbuka, angka kemiskinan menurun, serta mendorong percepatan pembangunan daerah," ujarnya.

Gustami Hidayat Ajak Masyarakat Berperan Aktif Dalam Pengelolaan Sampah

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Gustami Hidayat mengajak masyarakat untuk ikut aktif berperan dalam pengelolaan sampah. Menurutnya, sampah tidak seluruhnya harus berakhir begitu saja di tempat pembuangan akhir namun masih bisa dipilah untuk dimanfaatkan Kembali bahkan mendatangkan nilai ekonomi.

Hal itu disampaikan anggota Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Barat itu saat melakukan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sampah kepada masyarakat Kota Padang di Gedung LKAAM Sumatera Barat, Jumat (13/3/2026).

"Kita berharap masyarakat ikut berperan aktif dalam pengelolaan sampah, karena tidak seluruhnya sampah tersebut dibuang percuma ke TPA tetapi bisa dipilah untuk bisa dimanfaatkan Kembali bahkan mendatangkan nilai ekonomi," kata Gustami.

Dia memaparkan, persoalan sampah sudah saatnya untuk dicermati bersama karena kapasitas semakin hari semakin meningkat, baik sampah rumah tangga atau lingkungan maupun sampah industri. Jika tidak dikelola dikhawatirkan nantinya melebihi daya tampung tempat pembuangan akhir.

Gusami menegaskan, persoalan sampah bukan hanya masalah kebersihan, tetapi juga berkaitan dengan kesehatan, lingkungan, dan perekonomian. Jika sampah yang dihasilkan hanya dibuang ke tempat pembuangan akhir, di masa mendatang akan mendatangkan ancaman bencana kepada masyarakat.

Saat ini tengah digalakkan program pengelolaan sampah melalui beberapa kegiatan seperti adanya Lembaga Pengelola Sampah (LPS) dan Bank Sampah. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan pengelolaan sampah melalui pemilahan dan pemanfaatan kembali untuk keperluan lain sehingga volume sampah yang menumpuk di TPA juga berkurang karena sebagian sudah didaur ulang atau dimanfaatkan kembali.

"Dengan demikian, material sampah tidak langsung dibuang ke TPA tetapi bisa dimanfaatkan kembali seperti untuk pupuk, berbagai kerajinan tangan, dan sebagainya yang mendatangkan nilai ekonomi," ujarnya.



Lebih jauh Gustami menerangkan, Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sampah lahir sebagai payung hukum bagi pelaksanaan pengelolaan sampah yang lebih maksimal. Perda tersebut untuk menguatkan kewenangan pemerintah dalam pengelolaan sampah, juga membuka peran aktif masyarakat lebih besar lagi sebagai bentuk kepedulian terhadap kebersihan lingkungan, kesehatan, dan keselamatan bersama.

"Sosialisasi Perda ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan sampah, sehingga meningkatkan partisipasi untuk ikut berkontribusi dalam pengelolaan sampah demi kualitas kesehatan lingkungan lebih baik lagi di masa depan," katanya.

Dalam sosialisasi tersebut juga hadir Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tasliatul Fuadi sebagai pemateri. Dia memaparkan bahwa Perda Nomor 1 Tahun 2025 bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah untuk menciptakan lingkungan yang bersih, meningkatkan kualitas kesehatan, serta menjadikan sampah bernilai ekonomi.

Menurutnya, pengelolaan sampah menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat yang harus direncanakan untuk jangka panjang dan berkelanjutan. Seiring kemajuan teknologi, sampah juga bisa menjadi sumber energi, bahan baku pembuatan pupuk, dan berbagai keperluan lainnya melalui prinsip pengelolaan sampah 3R atau Reduce, Reuse, dan Recycle. P

Ali Muda:

Perda Ketenagakerjaan Untuk Jaga Keseimbangan Kepentingan Pekerja dan Perusahaan



Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Ali Muda menegaskan, kepentingan pekerja dan kepentingan perusahaan pemberi kerja harus berjalan secara seimbang. Hak dan kewajiban pekerja dan perusahaan pemberi kerja harus terlaksana secara adil, jangan merugikan salah satu pihak.

Hal itu ditegaskan Ali Muda terkait implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2019 tentang Ketenagakerjaan, belum lama ini. Menurutnya, terlaksananya hak dan kewajiban secara adil dan seimbang antara pekerja dan perusahaan akan menciptakan suasana kerja yang kondusif dan nyaman sehingga iklim usaha berbending sejajar

dengan tingkat kesejahteraan masyarakat.

"Sumatera Barat memiliki Perda tentang Ketenagakerjaan sebagai tindak lanjut dari undang-undang untuk memberikan perlindungan kepada pekerja dan perusahaan dalam menjalankan hak dan kewajiban masing-masing agar seimbang untuk menciptakan iklim usaha yang sehat," kata Ali Muda.

Dia menambahkan, sebagai turunan dari peraturan perundang-undangan, Perda Ketenagakerjaan secara spesifik memuat aturan yang mengedepankan kearifan local. Salah satunya adalah terkait penyerapan tenaga kerja, hendaknya perusahaan memberikan prioritas kepada

tenaga kerja dalam daerah.

Ali Muda menyebutkan, banyak perusahaan terutama di sektor perkebunan yang beroperasi di Sumatera Barat, seperti di Kabupaten Pasaman, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Dharmasraya dan lainnya.

"Keberadaan berbagai perusahaan tersebut tentunya membuka peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan kesempatan kerja. Perda ini memberikan penguatan untuk hal itu, sepanjang tenaga kerja tersebut memenuhi persyaratan sesuai yang dibutuhkan perusahaan," ujarnya.

Dia menegaskan, peraturan daerah dilahirkan terutama untuk kesejahteraan masyarakat termasuk memberikan rasa aman kepada iklim usaha dan investasi. Jumlah pencari kerja di Sumatera Barat sangat tinggi seiring pertumbuhan penduduk, namun daya tampung lapangan kerja dalam daerah masih belum mencukupi.

Perda Ketenagakerjaan memberikan perlindungan kepada masyarakat pekerja, sekaligus meningkatkan rasa aman dan kepercayaan dari pihak perusahaan. Diharapkan, Perda tersebut bisa terlaksana dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menciptakan iklim usaha yang sehat dan produktif untuk kemajuan daerah. P



Bamus Susun Agenda Masa Sidang Kedua 2025/2026

Muhidi: Kunci Optimalisasi Fungsi DPRD

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Muhidi menegaskan bahwa penyusunan jadwal atau agenda kedewanan oleh Badan Musyawarah menjadi kunci bagi optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Baik dari fungsi legislasi, fungsi anggaran, maupun fungsi pengawasan dan termasuk juga dalam menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Hal itu ditegaskan Muhidi saat membuka rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk menyusun agenda DPRD dalam

masa persidangan kedua tahun 2025/2026, Senin (30/3/2026). Menurut Muhidi, penyusunan agenda harus dilakukan secara matang, sistematis, dan sinkron dengan pemerintah daerah.

"Penyusunan agenda harus dilakukan secara matang karena merupakan kunci dari optimalisasi kinerja DPRD dalam menjalankan fungsinya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah," tegas Muhidi.

Dia menerangkan, penjadwalan agenda oleh Bamus merupakan pedoman dalam pelaksanaan seluruh kegiatan kedewanan pada setiap masa persidangan. Untuk itu hendaknya dilakukan secara detail, sistematis, termasuk juga

sinkronisasi dengan agenda pemerintah daerah sehingga jadwal yang disusun dapat berjalan secara maksimal.

"Penyusunan secara terencana, sistematis, dan sinkron dengan agenda pemerintah daerah menjadikan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD lebih efektif," ujarnya.

Dia berharap rapat pembahasan penyusunan agenda DPRD yang dilakukan dapat berjalan baik dan menghasilkan jadwal yang efektif. Dengan demikian, seluruh alat kelengkapan DPRD dapat memaksimalkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidang masing-masing. P

Penerapan Otonomi Daerah Harus Memberikan Dampak Nyata Kepada Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat



Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Muhidi menegaskan, pelaksanaan otonomi daerah harus memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan yang maksimal, dan penguatan ekonomi hendaknya menjadi prioritas dalam pelaksanaan pemerintahan daerah.

Hal itu disampaikan Muhidi usai upacara peringatan ke-30 Hari Otonomi Daerah di Kantor Gubernur Sumatera Barat, Senin (27/4/2026). Menurut Muhidi, penerapan otonomi daerah tidak boleh berhenti pada pembagian kewenangan semata, namun harus diwujudkan dalam bentuk pelayanan publik yang maksimal. "Peringatan Hari Otonomi

Daerah menjadi pengingat bahwa kewenangan yang diberikan kepada daerah harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab demi kesejahteraan rakyat," kata Muhidi.

Dia menjelaskan, sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah dituntut lebih proaktif mendorong kewirausahaan yang mampu membuka lapangan kerja baru. Selain itu, daerah juga perlu memperluas investasi untuk mendukung pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebagai tulang punggung ekonomi rakyat.

Muhidi menegaskan, sektor kesehatan juga harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pemerataan pelayanan Kesehatan, berkualitas, dan

terjangkau hanya dapat terwujud melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Selanjutnya di sektor pendidikan, harus diprioritaskan pemerataan akses melalui pembangunan infrastruktur, pemberian beasiswa, serta percepatan digitalisasi pendidikan. Selain itu, kualitas guru, kurikulum, dan fasilitas belajar juga harus terus ditingkatkan.

"Setiap kebijakan dan anggaran daerah harus benar-benar memberi dampak langsung bagi masyarakat, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, UMKM, dan penanggulangan bencana," tegasnya.

Dari sisi penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan, otonomi daerah harus melalui upaya reformasi birokrasi yang tidak hanya berorientasi kepada program pembangunan dengan tujuan sekadar penyerap anggaran, namun harus berdampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat.

Muhidi menegaskan, DPRD Sumatera Barat akan terus mengawal setiap kebijakan daerah agar selaras dengan program nasional, tepat sasaran, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Penerapan otonomi daerah harus dimanfaatkan lebih besar lagi untuk memacu pembangunan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. P

Sekretariat dan Tim Ahli DPRD Sumbar Perkuat Sinergi dan Koordinasi



Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat dengan tim ahli untuk memperkuat sinergi dan koordinasi sebagai upaya mengoptimalkan tugas dan fungsi dalam menunjang kinerja DPRD.

"Agar pelaksanaan tugas DPRD dapat berjalan dengan baik, Sekretariat DPRD bersama tim ahli harus meningkatkan sinergi dan koordinasi dalam menunjang kinerja lembaga DPRD," kata Maifrizon dalam rapat bersama tim ahli, Selasa (31/3).

Rapat tersebut membahas berbagai langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kontribusi tim ahli memberikan kajian, masukan, serta dukungan keahlian terhadap pelaksanaan tugas kedewanan. Kemudian juga untuk meningkatkan peran

sekretariat dalam memfasilitasi seluruh kegiatan DPRD sehingga dapat berjalan lancar tanpa kendala.

"Langkah-Langkah ini sangat penting untuk meningkatkan peran dalam memfasilitasi, memberikan masukan dan kajian terhadap berbagai agenda dan permasalahan yang tengah dibahas DPRD," ujarnya.

Ketua Tim Ahli DPRD Provinsi Sumatera Barat H. M. Nurnas dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa rapat koordinasi tersebut sangat dibutuhkan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam menunjang kelancaran kegiatan kedewanan.

"Dengan koordinasi yang solid, sekretariat bersama tim ahli DPRD dapat meningkatkan kontribusi dalam menunjang kinerja

DPRD secara kelembagaan sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dapat berjalan secara optimal, efektif, akuntabel, dan profesional," ujar Nurnas.

Tim Ahli DPRD menurut Nurnas, bertugas memberikan masukan dan pertimbangan kepada DPRD terhadap permasalahan yang dibahas oleh DPRD. Masukan dan pertimbangan tersebut diperoleh melalui kajian dan analisis berkaitan dengan kebijakan maupun gagasan yang bisa dilakukan oleh DPRD terhadap permasalahan tersebut.

Dia berharap, melalui penguatan sinergi dan koordinasi dengan sekretariat DPRD, ke depan tim ahli dapat meningkatkan kontribusi dalam menunjang kinerja DPRD Provinsi Sumatera Barat. P

Ketua DPRD Sumbar Ikuti Retret Nasional di Akmil Magelang



Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Muhidi, mengikuti Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) dalam format retret nasional di Akademi Militer (Akmil) Magelang, tanggal 15 sampai 19 April 2026. Retret tersebut diikuti oleh 557 Ketua DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Terkait hal itu, Muhidi menegaskan kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya memperkuat kapasitas kepemimpinan dan meningkatkan kinerja DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Melalui retret tersebut, dia berharap mendapatkan pengalaman dan pemahaman baru untuk semakin menguatkan DPRD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

"Retret ini menjadi ajang untuk menempa kesiapan baik fisik maupun mental sebagai pimpinan, untuk membawa lembaga DPRD semakin kuat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah," tegas Muhidi.

Dia menjelaskan, rangkaian kegiatan retret termasuk juga latihan fisik, di samping bimbingan dan pelatihan yang disajikan oleh para pakar untuk meningkatkan pemahaman terhadap berbagai urusan pemerintahan daerah. Program tersebut menitikberatkan pada pentingnya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah agar pelaksanaan pembangunan di tingkat lokal berjalan lebih efektif serta selaras dengan agenda nasional.

Menurutnya, selama lima

hari kegiatan, akan diisi dengan penyajian materi tentang kepemimpinan strategis, wawasan kebangsaan, serta latihan kedisiplinan. Penguatan kapasitas pimpinan DPRD tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan nasional.

"Kegiatan ini bertujuan membentuk karakter kepemimpinan yang kuat, berintegritas, serta mampu menjalankan peran strategis dalam sistem pemerintahan," ujarnya.

Kegiatan Retret Ketua DPRD seluruh Indonesia tersebut dilaksanakan atas kerja sama Asosiasi DPRD Provinsi dan Asosiasi DPRD Kabupaten/Kota se-Indonesia dengan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Republik Indonesia. Kegiatan dibuka oleh Presiden RI Prabowo Subianto. P

Tutup Masa Sidang Kedua 2025/2026

DPRD Sumbar Sampaikan Laporan Reses dan Kinerja



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menyampaikan laporan reses dan kinerja masa persidangan kedua tahun 2025/2026 dalam rapat paripurna, Kamis (29/4). Penyampaian laporan tersebut sesuai dengan tata kerja pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang diatur dalam pasal 87 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018.

Ketua DPRD Sumatera Barat Muhidi mengatakan, penyampaian laporan reses dan kinerja itu dalam rangka akuntabilitas, transparansi, serta pertanggungjawaban moral dan politis. Dia memaparkan, reses masa sidang kedua tahun 2025/2026 dilaksanakan mulai tanggal 2 hingga 12 Februari 2026, sesuai dengan agenda kegiatan DPRD yang telah ditetapkan dalam rapat Badan Musyawarah.

"Dari pelaksanaan reses tersebut, banyak aspirasi yang disampaikan masyarakat dan

pemerintah daerah," paparnya.

Aspirasi tersebut terkait dengan kebutuhan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah yang berupa usulan baru. Ada pula yang bersifat mengingatkan kembali usulan sebelumnya yang belum ditindaklanjuti dalam program pembangunan daerah pada masa persidangan pertama.

"Aspirasi yang disampaikan tersebut menjadi tugas dan tanggung jawab bersama untuk diperjuangkan dalam program pembangunan daerah," katanya.

Aspirasi-aspirasi tersebut telah dihimpun sekretariat DPRD untuk diserahkan pada pemerintah daerah agar dapat dimasukkan dalam program dan kegiatan pembangunan daerah. Dia meminta pemerintah daerah agar dapat mengakomodir laporan tersebut menjadi bahan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai bagian dari pokok-pokok pikiran DPRD. Dengan telah

diserahkannya hasil reses tersebut, Muhidi meminta komisi-komisi DPRD untuk mengawal dan menindaklanjutinya bersama organisasi pemerintah daerah (OPD) mitra kerja masing-masing.

Terkait laporan kinerja, Muhidi mengatakan, dalam tata tertib DPRD, masa persidangan kedua dimulai tanggal 28 Desember 2025 hingga 29 April 2026. Oleh sebab itu, dengan berakhirnya masa persidangan kedua tersebut, maka dalam rangka akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas dan fungsinya, pada rapat paripurna itu DPRD menyampaikan laporan kinerja.

Ia memaparkan, dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan selama masa persidangan kedua terdapat sejumlah poin. Pertama, pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah (perda). Selama masa persidangan kedua, DPRD bersama pemerintah daerah

telah membahas satu rancangan peraturan daerah (ranperda), yaitu ranperda tentang jasa konstruksi.

"Ranperda ini merupakan turunan dari propemperda (program pembentukan peraturan daerah) tahun 2025," katanya.

Selain itu, DPRD juga telah melakukan harmonisasi terhadap dua ranperda usul insiatif, yaitu ranperda perlindungan dan pemberdayaan petani dan ranperda perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Poin kedua, pelaksanaan fungsi anggaran. Muhidi mengatakan, DPRD melalui badan anggaran bersama pemerintah daerah dan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) melakukan rapat kerja dalam rangka evaluasi realisasi pendapatan asli daerah (PAD) triwulan pertama tahun 2026.

Ketiga, pelaksanaan fungsi pengawasan. Pada masa persidangan kedua tahun 2025/2026, pemerintah daerah telah menyampaikan Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKJP) Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 kepada DPRD.

"Panitia khusus telah menyelesaikan pembahasan LKJP dan menyampaikan rekomendasi pada rapat paripurna DPRD tanggal 28 April 2026 kemarin," kata Muhidi.

Pembahasan LKJP, tambah Muhidi, merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD. Dari pengawasan tersebut, cukup banyak catatan dan rekomendasi yang telah disampaikan kepada pemerintah daerah untuk dijadikan bahan perbaikan dan penyempurnaan.

Penyampaian laporan dan kinerja DPRD tersebut menandai berakhirnya masa persidangan kedua tahun 2025/2026. Rapat paripurna dilanjutkan dengan pembukaan masa persidangan ketiga 2026/2027 di mana sejumlah agenda penting telah

menunggu untuk segera dibahas dan dituntaskan.

Muhidi menilai, pada masa persidangan ketiga tahun 2026/2027, cukup banyak tugas-tugas penting yang akan dilaksanakan DPRD. Tugas tersebut antara lain Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025, pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025, dan sejumlah agenda penting lainnya.

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh Anggota DPRD atas dedikasi, kerja sama, dan komitmen yang telah terbangun dengan baik selama masa persidangan kedua tahun 2025/2026.

"Berbagai agenda kedewanan telah dapat dilaksanakan secara optimal melalui semangat kebersamaan dan bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat," ujar Mahyeldi.

Selama masa persidangan kedua tersebut, lanjut Mahyeldi, pemerintah provinsi terus berupaya menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan daerah secara konsisten dan terarah. Berbagai program dan kegiatan prioritas telah dilaksanakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat pembangunan di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan.

"Capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh pemangku kepentingan daerah yang terus diarahkan agar pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan ke depan berjalan lebih efektif, tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan

masyarakat," tuturnya.

Mahyeldi menyadari ke depan, pemerintah daerah dihadapkan kepada berbagai tantangan, baik yang bersumber dari kondisi ekonomi, keterbatasan fiskal, maupun tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik.

"Kondisi tersebut menuntut perencanaan yang semakin matang, kebijakan yang tepat sasaran, serta penguatan koordinasi antar perangkat daerah agar setiap program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan," katanya.

Seiring dengan dimulainya masa persidangan ketiga tahun 2026/2027, Mahyeldi menilai akan ada banyak agenda strategis daerah yang memerlukan pembahasan dan perhatian bersama. Di antaranya terkait penetapan kebijakan, penguatan fungsi pengawasan, serta optimalisasi pelaksanaan program pembangunan.

"Kami berharap nantinya setiap keputusan yang diambil benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan daerah," katanya.

Dia menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk terus memperkuat sinergi dan kemitraan yang sejajar dengan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Keterbukaan terhadap masukan, penguatan koordinasi, serta komunikasi yang berkesinambungan akan senantiasa menjadi landasan dalam setiap perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah.

"Dengan semangat kebersamaan dan tanggung jawab, pelaksanaan tugas pada masa persidangan ketiga tahun 2026/2027 akan berjalan efektif dan produktif, serta menghasilkan keputusan-keputusan strategis yang berdampak nyata bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat," tutupnya. T



Gencarkan Sosialisasi Pajak Air Permukaan, Evi Yandri ke Dharmasraya

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Evi Yandri Rajo Budiman berkunjung ke Kabupaten Dharmasraya, Senin (2/3/2026) untuk menggencarkan sosialisasi pajak air permukaan. Dengan banyaknya perusahaan terutama perkebunan kelapa sawit yang beroperasi, daerah itu memiliki potensi pajak air yang sangat besar.

Dalam kesempatan sosialisasi tersebut, Evi Yandri menekankan, pajak air permukaan merupakan sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang potensial untuk menunjang pembangunan daerah. Pemungutan pajak air permukaan berlandaskan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Permen PUPR tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Perolehan Air Permukaan.

"Regulasi ini ditindaklanjuti melalui Perda Retribusi Daerah dan Pajak Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 13 tahun 2023 tentang Pajak Air Permukaan," jelas Evi Yandri.

Dengan demikian, lanjutnya, dalam hal regulasi pemungutan pajak air permukaan sudah memiliki payung hukum yang kuat sehingga menjadi sumber potensial bagi mendongkrak PAD demi meningkatkan pembangunan.

Dia menegaskan, pemungutan pajak air permukaan bukan saja sekadar upaya menggenjot penerimaan daerah. Namun lebih luas lagi adalah untuk menegakkan prinsip keadilan yang berkelanjutan. Pemanfaatan air tanah dan air permukaan oleh korporasi untuk kepentingan komersil sudah semestinya memberikan dampak kepada kepentingan masyarakat berupa program pembangunan daerah.

Evi Yandri melanjutkan, potensi sumber pendapatan daerah dari pajak air permukaan hendaknya menjadi perhatian semua pihak terkait, termasuk pemerintah kabupaten/ kota. Secara undang-undang, objek pajak tersebut merupakan kewenangan pemerintah provinsi namun dalam pelaksanaannya

tentu membutuhkan koordinasi dan kolaborasi agar potensi tersebut dapat tergarap optimal untuk kepentingan pembangunan daerah.

Dalam kesempatan itu, Bupati Dharmasraya Anita Suchi Ramadhani menegaskan komitmennya untuk meningkatkan perhatian kepada potensi pajak air permukaan. Sebab, menurutnya, Kabupaten Dharmasraya memiliki banyak perusahaan perkebunan kelapa sawit yang menjadi wajib pajak sehingga kontribusi perusahaan kepada pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.

Anisa menambahkan, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif, termasuk untuk perusahaan perkebunan kelapa sawit. Sebaliknya, investasi hendaknya dapat memberikan imbal balik melalui pemenuhan kewajiban pajak yang akan digunakan untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. P

Hj. Aida Halalbihalal dengan Pengurus PGRI Kecamatan Guguak



Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Aida menghadiri kegiatan halalbihalal dengan pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kecamatan Guguak Kabupaten Limapuluh Kota, Sabtu (4/4/2026). Halalbihalal tersebut

dilaksanakan sebagai upaya mempererat silaturahmi dalam suasana hari raya Idulfitri sekaligus memperkuat sinergi anggota DPRD dengan para guru dalam memajukan dunia Pendidikan.

"Halalbihalal ini pertama tujuannya tentu untuk mempererat silaturahmi, selain itu juga menjadi ajang membangun sinergi antara anggota DPRD dengan para guru untuk kemajuan dunia Pendidikan di Sumatera Barat," kata politisi Partai Demokrat daerah pemilihan Kabupaten Limapuluh Kota dan Kota Payakumbuh tersebut.

Aida dalam kesempatan itu mengajak para guru dan seluruh masyarakat untuk terus meningkatkan peran dalam memajukan pendidikan. Sebagai tenaga pendidik, ke depan akan dihadapkan kepada berbagai tantangan seiring perkembangan zaman.

"Sektor pendidikan harus menjadi perhatian bersama mengingat tantangan dalam mencerdaskan generasi bangsa ke depan akan semakin berat. Untuk kemajuan dunia pendidikan membutuhkan kerja sama yang baik antara masyarakat, guru-guru dan pemerintah," ujarnya. P

Warga Lawang Dapat Pelatihan Mengolah Bambu Jadi Kerajinan Tangan

Sebanyak 16 orang warga Lawang, Kecamatan Matur Kabupaten Agam mendapatkan pelatihan mengolah bambu menjadi berbagai macam kerajinan tangan. Pelatihan mengolah potensi pohon bambu sebagai bahan baku kerajinan tangan tersebut berlangsung selama 20 hari digagas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Rafdinal.

Menurut Rafdinal, pohon bambu bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan termasuk untuk diolah menjadi kerajinan tangan yang mendatangkan nilai ekonomi. Sementara, hampir di setiap daerah pohon bambu tumbuh subur di lahan-lahan milik masyarakat.



"Tanaman bambu mudah ditemukan di hampir setiap daerah termasuk di Nagari Lawang, bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan kerajinan tangan. Jika dikerjakan oleh tangan-tangan terampil akan bernilai jual tinggi sehingga berpotensi menjadi sumber ekonomi bagi masyarakat," kata Rafdinal saat membuka pelatihan tersebut, Senin (27/4/2026).

Rafdinal mengungkapkan, pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat memanfaatkan sumber daya alam dengan bahan baku yang mudah ditemui di sekitar tempat tinggal. Dengan bahan baku yang mudah diperoleh, diharapkan mampu meningkatkan produktivitas masyarakat pengrajin sebagai mata pencarian atau tambahan penghasilan.

"Pada intinya pelatihan ini adalah bagaimana masyarakat mampu mengolah sumber daya yang ada di sekitar menjadi sesuatu yang mendatangkan

nilai ekonomi," ujarnya.

Lebih jauh Rafdinal menegaskan, peningkatan keterampilan masyarakat sangat penting untuk mendorong agar mandiri secara ekonomi. Bermodal sumber daya lokal, masyarakat yang telah memiliki keterampilan akan mudah berkreasi mengolah potensi alam yang ada untuk dijadikan sumber ekonomi.

"Masyarakat yang memiliki keterampilan akan mampu mandiri, mengolah berbagai potensi alam yang ada untuk dijadikan sumber ekonomi," lanjutnya.

Pembukaan pelatihan tersebut dihadiri oleh Kepala Balai Latihan Kerja (BLK) Payakumbuh Satri Edi, Camat Matur Efendi, dan Wali Nagari Lawang. Hadir juga tokoh masyarakat H. Abrar yang memfasilitasi kegiatan pelatihan tersebut serta instruktur pelatihan, Musrizal. Diharapkan, pelatihan dapat berjalan baik dan peserta dapat menyerap materi yang diberikan untuk kemudian akan menjadi modal usaha setelah pelatihan. P

Ketua Komisi IV DPRD Sumbar Dorong Pemerataan Akses Listrik

Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Doni Harsiva Yandra berjanji akan terus memperjuangkan pemerataan akses listrik masyarakat hingga ke daerah terpencil.

Hal itu disampaikan Doni Harsiva Yandra saat melaksanakan safari Ramadan di Masjid Baiturrahmah Kampung Lubuk Pasing Nagari Talaok Kecamatan Bayang, Pesisir Selatan, Rabu (4/3/2026).

"Kami akan terus mendorong agar jaringan listrik bisa menjangkau hingga ke pelosok sehingga seluruh permukiman penduduk mendapatkan akses listrik," kata Doni.

Dia menambahkan, akses listrik sangat penting karena berkaitan erat dengan seluruh aktivitas masyarakat sehingga perlu terus didorong untuk dapat menjangkau seluruh wilayah. Ketersediaan akses



listrik menjadikan kualitas hidup masyarakat bisa meningkat, baik dari sisi pendidikan, ekonomi, dan lainnya.

Wali Nagari Talaok, Ilwardi menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan perhatian yang diberikan kepada masyarakat di kenagarian setempat.

"Jadi, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Anggota DPRD Provinsi Sumbar dalam kegiatan Safari Ramadan ini. Kami berharap

aspirasi terkait pemerataan listrik dan pembangunan lainnya dapat segera direalisasikan," harapnya.

Dalam kegiatan itu, Doni Harsiva Yandra menyerahkan bantuan secara simbolis untuk kelanjutan pembangunan Masjid sebanyak Rp30 juta melalui APBD Provinsi Sumatera Barat. Bantuan tersebut diterima oleh pengurus Masjid Baiturrahmah Lubuk Pasing, Refri didampingi wali nagari, dan tokoh masyarakat setempat, Akhiyen Nuardi. P



Ketua DPRD Sumbar Muhidi:

RKPD Sumbar 2027 Menuntut Kecermatan dan Keberanian Berinovasi

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2027 mengusung tiga fokus Utama yaitu akselerasi transformasi ekonomi, inklusi sosial, dan ketahanan pangan. Perencanaan pembangunan daerah tahun 2027 dihadapkan kepada tantangan ketidakpastian ekonomi global dan gejolak geopolitik yang memberikan tekanan kepada APBN dan berdampak kepada keuangan daerah.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Muhidi, saat menghadiri musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025, Rabu (8/4/2026). Dia menekankan, RKPD tahun 2027 menuntut kecermatan, inovasi, dan keberanian dalam mengambil langkah-langkah strategis untuk menghadapi kondisi ruang fiskal yang menyempit akibat kebijakan efisiensi anggaran.

"Dengan fokus kepada tiga isu utama yaitu akselerasi transformasi ekonomi, inklusi sosial, dan ketahanan pangan, RKPD tahun 2027 harus disusun secara cermat, mengingat ketidakpastian ekonomi global yang masih berlanjut yang memberikan tekanan kepada APBN yang tentunya mempersempit ruang fiskal daerah," kata Muhidi.

Dia mengingatkan, pemerintah daerah harus

berani berinovasi untuk menggali seluruh potensi sumber-sumber pendapatan daerah secara lebih optimal. Hal itu disebabkan karena sumber pendapatan daerah yang berasal dari transfer pemerintah pusat berkurang, sementara program pembangunan daerah membutuhkan anggaran besar.

"Ditambah lagi, upaya rehabilitasi dan rekonstruksi bencana hidrometeorologi yang terjadi akhir tahun 2025 menimbulkan kerugian sekitar Rp33 triliun lebih membutuhkan anggaran pemulihan setidaknya sekitar Rp22 triliun. Ini menjadi tantangan berat yang harus dipenuhi karena pemulihan dampak bencana sangat penting," sebutnya.

Muhidi menekankan, untuk terlaksananya program pembangunan daerah yang telah direncanakan, maka sinergi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/ kota serta pemerintah pusat harus terbangun dengan baik. Termasuk juga peran aktif masyarakat dan dunia usaha.

Muhidi mengungkapkan, secara nasional, Rencana Kerja Pemerintah tahun 2027 memasuki fase percepatan peletakan fondasi transformasi dengan fokus kepada pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis produktivitas, investasi, dan industrialisasi. Menyelaraskan dengan RKP tersebut, RKPD Sumatera Barat mengusung tiga fokus utama

yaitu akselerasi transformasi ekonomi, inklusi sosial, dan ketahanan pangan.

Mengatasi kondisi fiskal daerah memenuhi kebutuhan anggaran untuk membiayai RKPD tersebut, mengoptimalkan pendapatan asli daerah adalah upaya yang harus dilakukan dengan serius. Antara lain melalui optimalisasi penerimaan dari pajak air permukaan, pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan, optimalisasi pengelolaan aset

dan BUMD, dan sumber-sumber pendapatan lainnya, seluruhnya harus tergarap secara maksimal.

Sementara itu, untuk belanja daerah harus dilakukan secara hati-hati agar anggaran yang tersedia bisa dimanfaatkan secara efektif. Alokasi anggaran harus diperhitungkan secara cermat dan tepat sasaran, sehingga terserap maksimal serta memberikan dampak langsung kepada percepatan pembangunan daerah dan perekonomian masyarakat. P

Bimtek Pluzi Akademi Angkatan I Tahun 2026

Muhidi Dorong Pelaku UMKM Tingkatkan Daya Saing

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Muhidi mendorong pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) meningkatkan kemampuan dalam menjalankan usaha sehingga memiliki daya saing di pasar baik regional, nasional bahkan pasar global.

Salah satu dorongan tersebut adalah dengan mengadakan bimbingan teknis bagi pelaku UMKM melalui program Pluzi Akademi untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi.

Membuka Bimtek Pluzi Akademi Angkatan Pertama tahun 2026, di UPTD PLUT Dinas Koperasi UMKM Provinsi Sumatera Barat, Senin (6/4/2026), Muhidi menegaskan bahwa kegiatan itu merupakan langkah nyata dalam upaya meningkatkan kapasitas dan daya saing pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya.

"Melalui Bimtek ini, kami mendorong pelaku UMKM di Sumatera Barat memiliki daya saing yang kuat di pasar, berkompeten, dan mampu mengelola dan mengembangkan usaha dengan baik," kata Muhidi.

Muhidi menyampaikan, UMKM memiliki peran penting dalam menopang perekonomian.



Usaha kecil terbukti mampu bertahan di tengah gejolak dan gonjang-ganjing ketidakpastian ekonomi global.

Ke depan, lanjutnya, pelaku UMKM diharapkan mampu mengikuti perkembangan zaman, beradaptasi dan memanfaatkan teknologi informasi untuk pengembangan usaha. Pelaku UMKM harus bisa memanfaatkan peluang di era digitalisasi untuk memasarkan produk lebih luas lagi.

"Bagi pelaku UMKM yang siap bersaing, era digitalisasi merupakan peluang untuk memperluas jangkauan pemasaran. Ini harus bisa dimanfaatkan dengan baik agar produk-produk yang dihasilkan dapat merambah pasar nasional bahkan internasional," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Muhidi

menyebutkan, bimtek peningkatan kapasitas pelaku UMKM melalui Pluzi Akademi berisi materi pelatihan terkait meningkatkan kualitas produk, manajemen usaha, strategi pemasaran termasuk pemanfaatan ruang digital dan lainnya. Materi yang disajikan akan sangat bermanfaat bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing sehingga ke depan semakin kuat dan mandiri.

"Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pelaku UMKM agar mampu mengelola usaha dengan manajemen yang lebih baik, menghasilkan produk yang berkualitas, serta menguasai strategi pemasaran baik secara manual maupun digital," tutupnya. P

Harus Digarap Optimal, Air Permukaan Bukan Objek Pajak Baru



Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Evi Yandri Rajo Budimen menegaskan, pajak air permukaan bukan objek pajak baru. Aturan pajak air permukaan telah ada sejak tahun 2022 melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 dan petunjuk teknis pelaksanaannya melalui Peraturan Gubernur Nomor 13 tahun 2023.

Hal itu ditegaskan Evi Yandri saat sosialisasi pajak air permukaan di Kabupaten Sijunjung, Selasa (3/3/2026). Menurutnya, berdasarkan UU Nomor 1 tahun 2022, pajak air permukaan menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Sejak lahirnya UU tersebut, pemungutannya telah dilaksanakan, namun belum berjalan secara optimal.

"Untuk itulah, pemerintah provinsi dan DPRD mengencakan sosialisasi agar ke depan pajak air permukaan

ini bisa dioptimalkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiayai program pembangunan demi kesejahteraan masyarakat," kata Evi Yandri.

Dia menjelaskan, pajak air permukaan dikenakan kepada perusahaan yang memanfaatkan air permukaan untuk keperluan komersil dan industri, baik langsung maupun secara tidak langsung. berdasarkan UU tersebut, maka pemanfaatan air permukaan untuk wisata air, pembangkit listrik, industri pertanian, perkebunan, kehutanan, dan semacamnya wajib dikenai pajak.

"Kabupaten Sijunjung termasuk daerah yang memiliki banyak perusahaan perkebunan kelapa sawit sehingga sosialisasi ini dilakukan dengan tujuan agar seluruh pihak terkait dapat meningkatkan kesadaran dalam memenuhi kewajiban membayar pajak air permukaan," ujarnya.

Evi Yandri menambahkan,

sosialisasi pajak air permukaan digencarkan setelah melakukan kajian bahwa potensi pendapatan asli daerah dari objek tersebut cukup besar. Di samping itu, pemungutan pajak tersebut juga berdasarkan prinsip keadilan yang berkelanjutan, di mana pemanfaatan air permukaan untuk tujuan komersil semestinya memberikan imbal balik kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah.

"Untuk besaran nilai pajak, setelah melakukan kajian dan mencari data pembandingan ke berbagai daerah, pajak air permukaan di Sumatera Barat sudah dipertimbangkan tidak akan memberatkan perusahaan wajib pajak yaitu dari kisaran 3 sampai 5 persen per hectare," ujarnya.

Dia berharap, pajak air permukaan dapat meningkatkan kontribusi pelaku usaha besar yang beroperasi di Sumatera Barat dalam pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. P

Ketua DPRD Sumbar Dorong Penguatan Perpustakaan Sebagai Pusat Literasi dan Informasi



Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Muhidi menegaskan, pihaknya akan terus meningkatkan peran dalam mendukung penguatan fungsi perpustakaan tidak hanya sebagai pusat literasi tetapi juga pusat informasi. Perpustakaan harus menjadi ruang pengayaan ilmu bagi masyarakat terutama generasi muda.

Hal itu disampaikan Muhidi saat menjadi pemateri pada kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis strategi pengembangan perpustakaan dan teknologi informasi komunikasi di aula Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat, Selasa (21/4/2026).

Muhidi menegaskan, perpustakaan harus bertransformasi menjadi pusat pengetahuan, ruang diskusi sekaligus sebagai wadah pengembangan kreativitas. Dia

meminta generasi muda agar memanfaatkan perpustakaan sebagai ruang belajar untuk meningkatkan literasi dan pematapan penguasaan teknologi informasi.

"Perpustakaan harus dijadikan sebagai pusat pengetahuan, sebagai ruang diskusi, serta pengembangan kreativitas untuk peningkatan literasi dan pematapan penguasaan teknologi informasi. Kami akan terus mendorong penguatan fungsi perpustakaan untuk tujuan tersebut," kata Muhidi.

Dia menambahkan, meningkatnya literasi generasi muda akan menghasilkan sumber daya manusia berkualitas, menumbuhkan kreativitas, dan menguasai teknologi informasi. Perpustakaan harus menjadi wadah bagi peningkatan tersebut, menjadi ruang

diskusi dan berkreasi sehingga melahirkan generasi yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Lebih jauh, Muhidi menegaskan, DPRD berkomitmen mendorong pemerintah daerah khususnya Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah untuk meningkatkan penguatan fungsi perpustakaan sebagai upaya mendorong peningkatan literasi dan inklusi masyarakat.

"Namun demikian, upaya penguatan fungsi perpustakaan membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, baik DPRD dan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, berbagai komunitas terkait, dan lainnya sehingga melalui sinergi dan kolaborasi yang kuat akan meningkatkan peran perpustakaan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Sumatera Barat," tutupnya. P

Yesi Endriani:

Kualitas SDM dan Fasilitas Penunjang Tentukan Kemajuan Pariwisata



Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Yesi Endriani menekankan, kualitas sumber daya manusia dan kelayakan fasilitas pendukung sangat memengaruhi kemajuan pariwisata. Untuk menggenjot pariwisata lebih maju lagi harus dilakukan melalui peningkatan kualitas SDM pelaku pariwisata diikuti dengan penyediaan fasilitas penunjang di sejumlah objek wisata.

Hal itu ditegaskan Yesi Endriani dalam rapat kerja komisi V bersama Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat belum lama ini. Dia menegaskan, Peningkatan kualitas SDM di bidang pariwisata bisa dilakukan melalui program pembinaan dan pelatihan dengan tujuan agar pelaku usaha wisata mampu memberikan pelayanan yang baik kepada wisatawan sehingga meningkatkan citra pariwisata daerah dan memicu peningkatan kunjungan.

"Pelaku usaha pariwisata, mulai dari pengelola lokasi wisata, pedagang makanan dan minuman, pemandu wisata, hingga pelaku usaha jasa angkutan wisata perlu diberikan pelatihan untuk meningkatkan layanan sehingga memberikan kesan baik kepada citra wisata daerah yang akan menjadi pemicu peningkatan kunjungan wisatawan," kata Yesi.

Kemudian, untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung, hendaknya fasilitas penunjang di lokasi wisata hendaknya juga mendapat perhatian. Lokasi wisata hendaknya harus selalu dalam keadaan bersih dan rapi, nyaman, dan aman. Fasilitas seperti toilet, atau tempat ibadah, tempat beristirahat, dan tempat parkir hendaknya selalu bersih dan tertib.

"Kenyamanan dan keamanan merupakan hal yang sangat penting di lokasi wisata, toilet harus bersih, tempat parkir harus tertib, tempat ibadah dan

tempat beristirahat harus selalu rapi. Petugas pengelola juga harus menjaga kenyamanan, ini menjadi nilai tambah sehingga meningkatkan citra objek wisata," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Pariwisata Sumatera Barat Lila Yanwar menyambut positif masukan yang diberikan DPRD tersebut. Lila menyatakan akan menindaklanjuti masukan dan saran yang diberikan untuk kemajuan pariwisata. Selain itu, pihaknya juga akan menggencarkan promosi, meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota serta para pelaku usaha pariwisata.

"Kami akan terus berupaya meningkatkan efektivitas promosi destinasi wisata Sumatera Barat, baik melalui pemanfaatan platform digital maupun kolaborasi lintas sektor. Dengan dukungan semua pihak, kami optimistis sektor pariwisata dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah," ujar Lila.

Dia mengatakan, sinergi antar pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sangat dibutuhkan untuk menyamakan persepsi dalam menyusun berbagai program pengembangan pariwisata. Dengan penguatan sinergi, kolaborasi, dan koordinasi seluruh pihak terkait, dia berharap ke depan pariwisata Sumatera Barat akan semakin maju. T



Tantangan Fiskal Daerah Semakin Berat

Komisi III DPRD Sumbar Dorong Optimalisasi Seluruh Potensi PAD

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat mendorong pemerintah daerah memaksimalkan upaya dalam menggarap sumber-sumber pendapatan asli daerah untuk memenuhi kebutuhan anggaran pembangunan. Mengatasi masalah keterbatasan fiskal daerah, penerimaan dari pendapatan asli daerah harus dioptimalkan untuk memperkuat struktur APBD sekaligus menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan ekonomi nasional dan global.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Mochkasin menegaskan, beberapa potensi sumber pendapatan asli daerah masih perlu digarap lebih serius. Antara lain pajak air permukaan, pajak

alat berat, pajak mineral bukan logam dan batuan, termasuk juga optimalisasi pengelolaan badan usaha milik daerah (BUMD).

"Sumber-sumber PAD ini harus digarap secara lebih optimal untuk memperkuat struktur APBD di tengah tekanan ekonomi nasional dan ekonomi global saat ini," kata Mochkasin, Minggu (12/4/2026).

Dia menerangkan, di awal tahun 2026 ini yang tengah gencar digarap oleh Pemprov bersama DPRD Sumatera Barat adalah pajak air permukaan. Sebelumnya, sumber PAD dari pajak air permukaan belum dikelola secara optimal sementara potensinya sangat besar.

"Tahun ini target PAD dari pajak air permukaan adalah sebesar Rp593 miliar, itu setelah

melakukan penghitungan matang sehingga meningkat signifikan dibanding sebelumnya yang hanya Rp14 miliar pertahun," sebutnya.

Dia menyebut, akurasi penggunaan air oleh korporasi dihitung dengan menggandeng tim pakar untuk merancang alat ukur debit air terpakai secara real time. Sasaran pemungutan pajak air permukaan juga diperluas ke perusahaan perkebunan sehingga bisa diperoleh target yang maksimal.

"Melalui Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 13 tahun 2023, diatur mekanisme penghitungan kewajiban yang harus dibayar oleh wajib pajak secara detail sehingga kita optimistis target pendapatan asli daerah dari pajak air permukaan bisa dimaksimalkan," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Nofrizon meminta kepala daerah Bersama organisasi pemerintah daerah (OPD) untuk terus menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah. Dia mengingatkan, dengan kondisi saat ini, pemerintah daerah tidak bisa hanya mengandalkan dana pemerintah pusat.

"Daerah harus berinovasi, menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah dan mengoptimalkannya. Kami meminta kepala daerah bersama perangkatnya untuk terus menggarap potensi sumber pendapatan secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan dana pembangunan daerah," tegasnya.

Dia menambahkan, kondisi fiskal daerah mengalami tekanan yang cukup berat. Jika hal itu tidak disikapi dengan baik,

akan menjadi hambatan yang sangat memengaruhi percepatan pembangunan. Perekonomian mengalami perlambatan, angka kemiskinan bisa meningkat, dan pengangguran bertambah.

Nofrizon memaparkan, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada tahun 2025 mengalami perlambatan dibanding tahun 2024 dari 4,37 persen menjadi 3,37 persen. Penopang utama perekonomian masih besar dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, diikuti oleh sektor jasa, komunikasi, dan pariwisata.

Menurutnya, sejauh ini sumber utama pendapatan asli daerah masih berumpu kepada pajak kendaraan bermotor. Untuk itu perlu digali potensi PAD lainnya untuk dioptimalkan seperti pajak dan retribusi dari sektor-sektor lain, termasuk juga optimalisasi pengelolaan aset daerah dan

peningkatan kinerja BUMD.

Sementara itu, lanjutnya, perlu dilakukan pendekatan kepada berbagai perusahaan terutama perusahaan kelapa sawit yang memiliki ribuan kendaraan pengangkut namun tercatat di luar provinsi Sumatera Barat. Hal itu hendaknya juga dikoordinasikan dengan perusahaan terkait, sebab berdasarkan aturan Kementerian Dalam Negeri, kendaraan bernomor luar daerah yang beroperasi selama tiga bulan berturut-turut wajib dilakukan balik nama ke daerah tempat beroperasi oleh perusahaan pemilik kendaraan.

"Seluruh potensi ini harus dioptimalkan, pemerintah daerah harus mendatangi perusahaan pemilik kendaraan agar melakukan balik nama ke wilayah Provinsi Sumatera Barat," tandasnya. P

Ketua Komisi IV DPRD Sumbar Minta

Wali Nagari Data Warga Kurang Mampu yang Belum Mendapat Akses Listrik



Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Doni Harsiva Yandra melaksanakan Safari Ramadan di Masjid Baitul Huda Ganting, Kenagarian Kapeh Panji, Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan,

Jum'at malam (6/3/2026).

Dalam kesempatan itu, dia menegaskan komitmennya untuk membantu penyambungan listrik bagi masyarakat yang belum mendapatkan akses listrik. Dia menyebutkan, tahun ini ditargetkan sebanyak 400 unit rumah di Kabupaten Pesisir Selatan dan Mentawai.

Doni meminta wali nagari untuk melakukan pendataan terhadap warga kurang mampu yang belum mendapatkan akses listrik di wilayah masing-masing. Dia menyampaikan, program pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat kurang mampu merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan, khususnya di sektor energi.

Selain sambungan listrik, dalam kesempatan

itu dia juga mendorong pemerintah daerah dan pihak terkait perbaikan irigasi karena berpengaruh langsung terhadap produktivitas pertanian masyarakat.

"Kalau irigasi berfungsi baik, tentunya ini berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat," ujar Doni.

Sementara itu, Wali Nagari Kapeh Panji Iswandi mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ketua Komisi IV DPRD Sumbar Doni Harsiva Yandra ke masjid Baitul Huda Ganting. Kehadiran anggota

DPRD tersebut dinilai sebagai sebuah kesempatan baik untuk menyampaikan berbagai aspirasi untuk diperjuangkan ke dalam program pembangunan provinsi.

Dalam kegiatan Safari Ramadan itu, Doni Harsiva Yandra memberikan bantuan secara simbolis untuk kelanjutan pembangunan masjid sebesar Rp25 juta Rupiah. Bantuan tersebut diterima oleh Ketua Pengurus Masjid Baitul Huda Ganting, Kischena Amardahlan didampingi Wali Nagari Kapeh Panji, Iswandi. P

Tinjau KPHL Pasaman Raya

Komisi II DPRD Sumbar Ingatkan Kepastian Hukum Batas Wilayah



Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat mengingatkan kepastian batas wilayah antara Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat harus sesuai dengan regulasi dan data resmi administrasi. Persoalan batas wilayah jangan sampai merugikan salah satu daerah, bahkan berdampak negatif kepada iklim usaha dan

investasi.

Hal itu diungkapkan Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat Khairuddin Simanjuntak dalam kunjungan kerja ke UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Pasaman Raya, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Kamis (16/4).

Kunjungan tersebut difokuskan kepada pengawasan

serta penegakan terhadap persoalan pergeseran batas wilayah antara Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat. Rombongan Komisi II dipimpin Ketua Komisi II, Khairuddin Simanjuntak, bersama anggota Asril dan Nurna Eva Karmila, disambut oleh Kepala UPTD KPHL Pasaman Raya, Terra Dharma.

Dalam pertemuan tersebut,

Komisi II menyoroti adanya indikasi pergeseran batas wilayah yang dinilai berpotensi merugikan Kabupaten Pasaman, khususnya di wilayah utara seperti Kecamatan Rao Utara, Mapat Tunggul, dan Mapat Tunggul Selatan.

"Persoalan batas wilayah ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Harus ada kejelasan yang mengacu pada regulasi dan data resmi agar tidak merugikan daerah," tegasnya.

Ia juga mengungkapkan, kawasan perbatasan tersebut saat ini mulai dilirik investor dari luar. Hal itu dikhawatirkan berpotensi memicu konflik kepentingan serta mempercepat terjadinya penguasaan wilayah oleh pihak lain.

"Jika tidak segera ditangani, kondisi ini bisa dimanfaatkan pihak tertentu. Apalagi sudah

ada indikasi ketertarikan investor di wilayah perbatasan tersebut," tambahnya.

Sementara itu, Kepala UPTD KPHL Pasaman Raya, Terra Dharma menyampaikan, pihaknya siap mendukung upaya pengawasan dan penegakan batas wilayah sesuai kewenangan kehutanan.

Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten, serta instansi terkait dalam menjaga keutuhan wilayah, khususnya kawasan hutan lindung yang memiliki fungsi strategis.

Komisi II DPRD Sumatera Barat dalam kunjungan tersebut juga meminta agar dilakukan verifikasi lapangan serta penelusuran dokumen batas wilayah secara komprehensif, untuk memastikan tidak terjadi

penyimpangan yang dapat merugikan daerah.

Kunjungan itu diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat pengawasan serta mempertegas batas wilayah, demi menjaga kedaulatan administrasi dan potensi sumber daya alam Kabupaten Pasaman dari potensi pengambilalihan oleh daerah lain.

Selain kunjungan ke Pasaman, Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat juga telah melakukan kunjungan kerja ke Nagari Kamang Hilir Kabupaten Agam. Kunjungan tersebut dipimpin Sekretaris Komisi II, Sutan Varel Oriano.

"Kunjungan kerja komisi II ke daerah ini dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan infrastruktur pertanian untuk meningkatkan hasil produksi pertanian," kata Varel. T

Komisi V DPRD Sumbar Akan Kawal Pelaksanaan Anggaran Pendidikan Berjalan Maksimal

Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menegaskan akan mengawal pemanfaatan anggaran Pendidikan yang disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terserap optimal. DPRD juga akan terus mendorong sinergi pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang unggul di masa depan.

Untuk memastikan hal

itu, Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Barat mengunjungi sejumlah Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMA dan SMK) di Kabupaten Pesisir Selatan, Kamis (9/4/2026). Kunjungan tersebut sekaligus sebagai bentuk pengawasan terhadap program dan kegiatan APBD provinsi di sektor pendidikan, termasuk yang dialokasikan melalui pokok-pokok pikiran anggota DPRD.

"Jenjang pendidikan SMA dan SMK memang merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Oleh karena itu kami melakukan

peninjauan ke SMA dan SMK untuk memastikan anggaran untuk sektor pendidikan tepat sasaran sesuai kebutuhan," kata Ketua Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Barat Lazuardi Erman.

Beberapa SMA dan SMK yang dikunjungi antara lain SMA Negeri 2 Painan dan SMK Negeri 2 Painan. Lazuardi menegaskan, kunjungan ke sekolah-sekolah juga efektif untuk menampung secara langsung kebutuhan yang diperlukan.

Saat kunjungan ke SMAN 2 Painan, salah satu yang dibahas bersama pihak sekolah adalah



rencana pembangunan kantin dengan alokasi dana Rp200 juta. Kebutuhan dana tersebut direncanakan menggunakan dana pokok pikiran (pokir) anggota DPRD. Rencana tersebut akan ditindaklanjuti agar bisa segera diwujudkan.

Sementara itu masih dalam kunjungan tersebut, Anggota Komisi V, Sri Kumala Dewi, mengatakan peninjauan dilakukan untuk memastikan seluruh persyaratan administratif, termasuk status lahan untuk pembangunan tersebut telah terpenuhi sebelum kegiatan dilaksanakan.

"Kami ingin memastikan tidak ada kendala di lapangan, sehingga pelaksanaan kegiatan bisa berjalan tepat waktu dan target penyerapan anggaran

tercapai," katanya.

Ia menjelaskan, pembangunan kantin tersebut merupakan aspirasi masyarakat yang sebelumnya diserap saat kunjungan lapangan. Kondisi kantin yang kurang layak dinilai berdampak pada kenyamanan siswa.

Menurutnya, fasilitas yang tidak memadai dapat mendorong siswa keluar dari lingkungan sekolah saat jam istirahat, sehingga berpotensi mengganggu pengawasan dan proses belajar.

"Dengan adanya kantin yang layak, kita harapkan siswa tetap berada di lingkungan sekolah dan proses pembelajaran lebih terjaga," tambahnya.

Selain pembangunan kantin, Komisi V DPRD Sumatera Barat

juga mencatat sejumlah program lain yang diusulkan sekolah, seperti pengadaan mobiler, pembangunan gedung, hingga pengembangan kelas digital, termasuk di SMAN 1 Lengayang dengan anggaran mencapai Rp500 juta.

Dewi menegaskan, DPRD Sumatera Barat akan terus mengawal pelaksanaan anggaran pendidikan agar berjalan optimal, akuntabel, dan tepat waktu. DPRD juga mendorong sinergi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pendidikan, sehingga setiap program yang dijalankan benar-benar berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah. T



Ketua Bapemperda DPRD Sumbar

Banyak Perda Belum Berjalan Maksimal



Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Muhammad Yasin menegaskan, akan terus mengevaluasi pelaksanaan peraturan daerah yang telah diterbitkan. Dia mengungkapkan, masih banyak perda yang sudah dibuat namun belum terlaksana secara optimal, bahkan ada yang belum diterbitkan petunjuk teknisnya.

Hal itu diungkapkan Muhammad Yasin terkait inventarisasi produk hukum daerah yang dilakukan bersama Tim Ahli DPRD Sumatera Barat belum lama ini. Menurutnya, Bapemperda terus melakukan inventarisasi terhadap perda-perda tersebut termasuk relevansi produk hukum yang sudah ada dengan perkembangan terkini peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

"Bersama Tim Ahli DPRD kami terus menginventarisir dan mengevaluasi, bagaimana perda yang telah dibuat telah berjalan. Apakah berjalan secara maksimal, atau perlu direvisi untuk menyesuaikan dengan kondisi terkini dari perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi," katanya.

Dia meminta, setiap perda yang telah diterbitkan untuk diikuti dengan aturan turunan dalam bentuk peraturan gubernur sebagai petunjuk pelaksanaannya. Perda diterbitkan untuk kepentingan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat, sehingga harus bisa dilaksanakan secara maksimal.

"Kewenangan untuk membuat petunjuk teknis

pelaksanaan perda ini ada di pemerintah daerah melalui Biro Hukum. Bagi Perda yang belum ada Pergub, hendaknya segera diterbitkan agar bisa dilaksanakan," ulasnya.

Sementara itu, dia juga mengungkap ada perda yang dinilai perlu direvisi untuk penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu, juga ada perda yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pemerintahan daerah atau perda yang perlu digabung dengan perda lain karena adanya kesamaan materi dan muatan.

"Seluruh persoalan tersebut terus diinventarisir sehingga nantinya produk hukum yang ada bisa diaplikasikan secara maksimal, untuk tujuan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan pembangunan daerah," tutupnya. P

Evi Yandri Sosialisasi Pajak Air Permukaan di Solsel

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Evi Yandri Rajo Budiman menyosialisasikan pajak air permukaan di Kabupaten Solok Selatan, Rabu (1/4/2026). Dia menegaskan, pajak air permukaan diatur di dalam Perda Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan UU Nomor 1 tahun 2022, dengan pelaksanaan teknisnya berdasarkan Peraturan Gubernur nomor 13 tahun 2023.

Sosialisasi tersebut dilakukan untuk meningkatkan pemahaman seluruh pemangku kepentingan termasuk wajib pajak mengenai pajak air permukaan yang merupakan amanah dari undang-undang sebagai tanggung jawab pihak-pihak yang menggunakan air tanah. Objek pajak tersebut bukanlah objek pajak baru, melainkan sudah diatur sejak tahun 2022.

"Pajak air permukaan merupakan tanggung jawab pihak-pihak yang memanfaatkan air permukaan sesuai yang diamanahkan undang-undang, dan sosialisasi ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman terhadap tanggung jawab tersebut," kata Evi Yandri.

Hadir dalam sosialisasi tersebut Asisten Administrasi Umum Setdaprov Sumatera Barat Medi Iswandi, Wakil Bupati Solok Selatan Yulian Efi, Sekdakab Solok Selatan, Forkopimda Solok Selatan, Kepala BPKD Solok Selatan, industri dan perusahaan selingkungan Solok Selatan. Turut hadir pula Tim Ahli DPRD Sumbar, M. Nurnas dan Rafliis.

Evi Yandri menegaskan, karena merupakan amanat undang-undang maka semua unsur memiliki kewajiban dan tanggung jawab menaatinya. Terutama bagi wajib pajak yakni perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan air permukaan secara langsung maupun tidak langsung untuk kebutuhan komersil.

Pemerintah daerah, lanjutnya, memiliki kewajiban untuk mengoptimalkan upaya pemenuhan kewajiban pembayaran pajak air permukaan sesuai ketentuan perundang-undangan. Dia menambahkan, sosialisasi dilakukan oleh DPRD bersama Pemprov Sumatera Barat ke seluruh kabupaten/ kota terutama di daerah yang memiliki perkebunan. Nantinya sosialisasi juga akan difokuskan kepada direksi perusahaan-perusahaan perkebunan agar pendapatan daerah dari pajak air permukaan dapat dioptimalkan.

Lebih jauh menurut Evi Yandri, berdasarkan UU Nomor 1 tahun 2022, pajak air permukaan dikenakan



kepada seluruh badan usaha yang memanfaatkan air tanah untuk komersil. Tidak hanya perusahaan air minum dan PLTA< tetapi juga kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit dan lainnya yang memanfaatkan air permukaan secara langsung atau tidak langsung.

"Jadi kewajiban pajak air permukaan kepada seluruh perusahaan yang memanfaatkan air untuk keperluan industri atau komersil seperti PDAM, PLTA, perusahaan sawit, wisata air, industri perikanan, industri pertanian, industri perkebunan dan lainnya," paparnya.

Evi Yandri menerangkan, optimalisasi pendapatan daerah dari seluruh objek pajak termasuk air permukaan merupakan upaya pemerintah daerah untuk menggali potensi sumber pendapatan untuk kebutuhan pembangunan. Hal itu harus dilakukan mengingat kondisi fiskal daerah yang terdampak kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat sehingga terjadi pengurangan dana transfer ke daerah.

"Memperhatikan kondisi fiskal daerah saat ini yang terdampak kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat, harus dilakukan melalui pengoptimalan seluruh potensi sumber pendapatan daerah agar mencukupi kebutuhan anggaran untuk pembangunan daerah," tandasnya.

Dalam kesempatan itu, Asisten Administrasi Umum Setdaprov Sumatera Barat Medi Iswandi menambahkan, pajak air permukaan merupakan salah satu sumber pendapatan strategis untuk keberlanjutan pembangunan daerah. Dia mengatakan, pajak air permukaan berada di bawah kewenangan provinsi sementara pajak air tanah merupakan kewenangan kabupaten/ kota.



Ketua DPRD Sumbar Hadiri *Entry Meeting* BPK

Dorong Penguatan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Muhidi menyatakan akan terus mendorong penguatan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah agar tetap sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (Good Government and Clean Governance).

Muhidi menegaskan hal itu usai menghadiri Entry Meeting Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2025 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Jakarta, Kamis (2/4/2026). Dia menegaskan, penguatan fungsi pengawasan merupakan bagian penting untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan transparan dan akuntabel.

"Menjalankan fungsi pengawasan yang dimiliki DPRD, kami mendorong penguatan pengawasan agar pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih," kata Muhidi.

Dia menambahkan, pemeriksaan LKPD oleh BPK merupakan bagian dari proses pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah agar berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Proses itu menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan tata kelola keuangan sehingga anggaran digunakan secara tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Tata kelola keuangan yang baik akan menghasilkan pembangunan yang maksimal, anggaran yang disediakan teresap secara baik dan setiap prosesnya sesuai dengan aturan," ulasnya.

Muhidi mengakui, tahun 2025 merupakan tahun pertama dari masa jabatan gubernur dan wakil gubernur periode 2025-2030. Masa tersebut sekaligus menjadi masa transisi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dari periode 2021-2026 ke periode 2026-2030.

Seiring itu, keuangan daerah dihadapkan kepada sejumlah tantangan cukup berat dengan berlakunya kebijakan efisiensi anggaran sehingga transfer dari pemerintah pusat ke daerah menjadi berkurang. Tantangan itu ditambah lagi dengan terjadinya

bencana hidrometeorologi pada akhir November 2025 yang terjadi di sebagian besar kabupaten/ kota yang menimbulkan kerugian besar.

"Tantangan ini harus disikapi oleh pemerintah daerah dengan cermat, agar anggaran yang tersedia mampu mengakomodir kebutuhan pembangunan, termasuk pemulihan pascabencana untuk memperbaiki berbagai fasilitas infrastruktur serta pemukiman masyarakat yang rusak akibat banjir bandang dan longsor tersebut," bebernya.

Terkait LKPD tahun 2025, Muhidi menyampaikan ada

pencapaian positif yang perlu mendapat apresiasi, seperti penurunan angka kemiskinan, dan berkurangnya angka pengangguran terbuka. Namun demikian, dari sisi pertumbuhan ekonomi, Sumatera Barat mengalami perlambatan dari 4,36 persen pada tahun 2024 menjadi 3,37 persen pada tahun 2025.

"Perlambatan pertumbuhan ekonomi ini juga tidak lepas dari bencana alam yang terjadi, di mana seharusnya pada akhir tahun mestinya pergerakan ekonomi lebih tinggi namun terkendala karena musibah banjir dan longsor," sebutnya.

Muhidi menyampaikan

apresiasi kepada BPK RI yang memiliki peran penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pemeriksaan BPK RI terhadap LKPD merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berjalan secara efektif, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Entry Meeting tersebut dipimpin Anggota V BPK RI Bobby Adhito Rizaldi, dihadiri oleh pejabat pemerintah pusat, anggota DPR RI, kepala daerah dan pimpinan DPRD provinsi seluruh Indonesia. P

Sekretaris Komisi III DPRD Sumbar Nofrizon:

Bapenda Harus Minta Perusahaan Pemilik Kendaraan Non-BA untuk Balik Nama

Sekretaris Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Nofrizon mengingatkan pemerintah daerah agar proaktif menggarap berbagai potensi sumber pendapatan asli daerah. Dalam kondisi fiskal yang menghadapi tekanan seperti saat ini, PAD harus dioptimalkan agar kebutuhan anggaran untuk pembangunan tercukupi.

Hal itu ditegaskan Nofrizon menyaoal kondisi keuangan daerah yang saat ini menurutnya sedang tidak baik-baik saja. Kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat membuat transfer ke daerah menjadi berkurang. Selain itu, kondisi



perekonomian global akibat situasi geopolitik berdampak kepada perekonomian nasional yang otomatis juga memengaruhi kondisi ekonomi daerah.

"Untuk itu pemerintah daerah harus proaktif berinovasi, menggarap seluruh potensi sumber pendapatan asli daerah supaya memenuhi kebutuhan anggaran untuk pembangunan," kata Nofrizon.

Dia mengakui, saat ini sumber utama pendapatan asli daerah masih didominasi oleh pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan, dan beberapa sumber lainnya. Salah satu yang tengah dimaksimalkan juga adalah pajak air permukaan.

Nofrizon menyentil, dari sisi kendaraan bermotor, banyak perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Sumatera Barat namun

kendaraan pengangkut yang dimiliki perusahaan tersebut bernomor kendaraan luar provinsi. Tentu saja yang menikmati pajaknya adalah daerah di mana kendaraan tersebut terdaftar,

"Pemerintah daerah melalui Badan Pendapatan Daerah hendaknya mendatangi perusahaan pemilik kendaraan ini untuk melakukan pendekatan bagaimana supaya kendaraan tersebut dibaliknamakan untuk terdaftar dengan nomor Sumatera Barat," ujarnya.

Nofrizon menjelaskan, permintaan tersebut sangat

beralasan, sebab kendaraan tersebut terutama truk tangki berbobot besar itu menggunakan jalan yang membutuhkan biaya pemeliharaan. Sangat adil jika pajak kendaraan tersebut masuk ke pendapatan asli daerah untuk dimanfaatkan kembali membangun atau memperbaikinya karena jalan tersebut juga dibutuhkan oleh masyarakat.

"Selain melintasi jalan nasional, truk tangka berbobot besar itu juga melintasi jalan provinsi dan jalan kabupaten. Jadi cukup adil rasanya kalau pajak kendaraannya juga masuk ke kas daerah," katanya.

DPRD Provinsi Sumatera Barat mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penggalan potensi sumber pendapatan asli daerah. Seluruh sumber PAD diminta untuk dimaksimalkan, baik dari pajak dan retribusi, maupun dari pengelolaan aset dan badan usaha milik daerah (BUMD). Salah satu sumber pendapatan yang saat ini tengah digencarkan adalah pajak air permukaan yang diharapkan dapat menyumbangkan PAD sebesar Rp593 miliar pada APBD tahun 2026, yang di tahun sebelumnya hanya sekitar Rp15 miliar. P

Belum Ada Perda Khusus

Pencegahan LGBT Bisa Melalui Pendekatan Nilai Adat dan Agama

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Nanda Satria mengajak seluruh unsur masyarakat untuk memperkuat pemahaman nilai-nilai adat dan agama kepada generasi muda. Dengan memiliki dasar yang kokoh, akan mampu menangkal pengaruh buruk dari pergaulan dan kemajuan teknologi informasi, termasuk perilaku LGBT.

Hal itu ditegaskan Nanda Satria menyikapi informasi mengenai perilaku LGBT yang belakangan ini ramai diperbincangkan masyarakat. Menurutnya, hal itu harus menjadi perhatian serius bagi seluruh masyarakat, terutama orang tua yang memiliki anak di usia remaja.

"Persoalan perilaku LGBT ini harus disikapi secara hati-hati, kepada generasi muda agar diperkuat nilai-nilai adat dan agama sebagai benteng untuk tidak terseret kepada perilaku sosial yang tidak sesuai norma-norma tersebut," tegasnya, Senin (6/4/2026).

Nanda menambahkan, Sumatera Barat merupakan daerah yang religius dengan filosofi adat basandi syarak-syarak basandi kitabullah (ABS-SBK). Dalam kehidupan sehari-hari selalu mengedepankan kearifan



lokal untuk menegakkan kehidupan sosial yang sesuai dengan norma dan nilai ABS-SBK tersebut.

Namun demikian, lanjutnya, perkembangan teknologi informasi tak dipungkiri membawa pengaruh positif dan negatif dalam kehidupan sosial. Pengaruh negatif dari perkembangan zaman tersebut, termasuk perilaku LGBT hendaknya disikapi dengan bijak dan hati-hati dengan mengedepankan kearifan lokal berdasarkan norma dan nilai-nilai adat dan agama

yang berlaku di tengah masyarakat.

"Penting untuk diperkuat pemahaman generasi terhadap nilai agama dan adat yang berlaku agar perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan norma sosial yang berlaku," ujarnya.

Penguatan pemahaman tersebut menurut Nanda melibatkan semua pihak, mulai dari keluarga, lingkungan sosial, lembaga Pendidikan dan tokoh agama dan tokoh masyarakat adat.

Lebih jauh Nanda mengungkapkan, Sumatera Barat belum memiliki peraturan daerah yang khusus ditujukan untuk penanganan perilaku LGBT. Namun demikian, selain pendekatan agama dan pendekatan adat, sejumlah perda yang sudah juga bisa dijadikan dasar dalam menjaga perilaku sosial yang sesuai dengan norma adat dan agama.

Dia menjelaskan, untuk membuat sebuah peraturan daerah, DPRD harus memastikan beberapa hal. Antara lain menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dari pemerintah pusat sebagai landasan lahirnya peraturan daerah. Untuk itu DPRD membutuhkan masukan dari berbagai pihak, kajian dari akademisi dan tim ahli, dan lainnya.

Meskipun belum ada perda yang secara khusus mengenai LGBT, Nanda berharap masyarakat juga melakukan pendekatan persuasif berdasarkan nilai-nilai adat dan agama untuk mencegah perilaku menyimpang. Melalui penguatan pemahaman nilai-nilai adat dan agama dirasakan sangat efektif untuk membentengi generasi muda dari perilaku menyimpang tersebut. P

Firdaus Sorot Kinerja Pemerintah

Banyak Target RPJMD Belum Tercapai

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Firdaus menyoroti sejumlah target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang belum tercapai sesuai harapan. Banyak target yang belum terealisasi terutama yang berkaitan dengan kondisi riil yang berkembang di tengah masyarakat.

Firdaus menyampaikan hal itu dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat yang beragendakan penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2025, Selasa (28/4/2026).

"Masih banyak pencapaian target yang sesuai dengan misi RPJMD 2021-2026 yang belum terealisasi sesuai harapan, meskipun secara umum kinerja pemerintah daerah sudah cukup baik namun ini perlu menjadi perhatian," tegas Firdaus menyampaikan pendapat akhir fraksinya, Fraksi PDIP-PKB.



Dia menyebutkan, salah satunya adalah implementasi dari filosofi Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah (ABS-SBK) yang semakin menurun. Hal itu menunjukkan bahwa program-program yang mendukung penerapan ABS-SBK tidak berjalan secara maksimal.

Sementara di bidang infrastruktur, Firdaus mengungkap masih banyak jalan, jembatan, dan irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dalam

keadaan rusak berat dan rusak sedang. Demikian juga di bidang pariwisata, pemerintah daerah belum mampu mewujudkan pembangunan satu destinasi wisata unggulan untuk satu kabupaten/ kota.

"Kami meminta hal ini menjadi perhatian pemerintah daerah, agar tujuan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai lebih baik lagi," ujarnya.

Dalam kesempatan itu Firdaus juga menyentil capaian makro ekonomi daerah tahun 2025. Dia menyebut, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat turun dari 4,36 persen tahun 2024 menjadi 3,37 persen pada tahun 2025. Kondisi itu menurutnya jauh di Bawah rata-rata nasional yang mengalami pertumbuhan 5,11 persen.

Menurutnya, penurunan pertumbuhan ekonomi disadari telah terjadi sejak lima tahun terakhir seiring dengan turunnya anggaran daerah. Kondisi ini mestinya disikapi oleh

pemerintah daerah dengan melakukan inovasi dalam menstimulus pergerakan ekonomi melalui berbagai program dan kebijakan.

Dia mengingatkan, dengan

membaca capaian yang disampaikan dalam LKPI Kepala Daerah tahun 2025, ke depan, pemerintah daerah bersama OPD untuk bekerja lebih maksimal lagi. Sektor-sektor penopang ekonomi

seperti pertanian, perikanan, industri dan pengolahan, serta pariwisata hendaknya dipacu agar semakin optimal menggerakkan ekonomi yang mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat. P

Verry Mulyadi Dorong Realisasi Pembangunan Akses Penghubung Batu Gadang-Baringin-Padang Besi



Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Verry Mulyadi mendorong agar rencana pembangunan akses penghubung Kelurahan Batu Gadang-Kelurahan Padang Besi-Kelurahan Baringin, Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang bisa direalisasikan. Pembangunan akses penghubung tiga kelurahan tersebut akan diperjuangkan melalui pokok-pokok pikirannya sebagai anggota DPRD provinsi untuk memenuhi kebutuhan akses jalan bagi masyarakat.

"Akses penghubung ini sudah lama diharapkan oleh masyarakat, untuk itu melalui pikir akan kami perjuangkan masuk ke dalam program pembangunan provinsi," kata Verry saat meninjau lokasi jalan penghubung tersebut Bersama pihak terkait, Jumat (3/4/2026).

Menurut Verry, jalan merupakan sarana vital bagi mobilitas masyarakat untuk pergerakan ekonomi dan akses ke sarana pendidikan, Kesehatan, dan lainnya. Pembangunan jalan penghubung tiga kelurahan tersebut sudah diharapkan masyarakat sejak lama.

"Untuk itu melalui pikir akan kami dorong agar bisa direalisasikan agar aktivitas sosial dan ekonomi

masyarakat bisa lebih lancar," katanya.

Lebih jauh Verry menjelaskan, untuk percepatan pembangunan dan mendorong pergerakan ekonomi masyarakat, akses jalan merupakan sarana penting yang harus dibenahi. Termasuk juga untuk kelancaran akses pelajar menuju sekolah, dan akses menuju tempat pelayanan Kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan pertolongan.

Dengan tersedianya akses jalan, maka mobilitas warga menjadi lancar, perekonomian bergerak, kualitas pendidikan dan kesehatan meningkat, serta peluang usaha menjadi semakin terbuka.

Dalam peninjauan tersebut, Verry Mulyadi didampingi Kepala Bidang Program dan Jasa Konstruksi Dinas PUPR Kota Padang, Novianti, serta lurah setempat. Masyarakat menyampaikan terima kasih atas niat Verry Mulyadi untuk memperjuangkan pembangunan jalan penghubung tersebut.

Kepala Bidang Program dan Jasa Konstruksi Dinas PUPR Kota Padang, Novianti, mengatakan pihaknya menyambut baik rencana pembangunan jalan tersebut. Menurutnya, peninjauan lapangan dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi wilayah yang direncanakan menjadi jalur penghubung antar kelurahan.

"Peninjauan ini penting untuk mengetahui kondisi teknis di lapangan sehingga perencanaan pembangunan dapat disusun secara lebih matang," ujarnya.

Dia menambahkan, pihaknya akan menindaklanjuti hasil peninjauan dan berbagai masukan dari masyarakat sebagai bahan perencanaan pembangunan. Dengan adanya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat, diharapkan rencana pembangunan jalan tersebut dapat segera direalisasikan. P



Tampung Aspirasi Kelompok Disabilitas

Muhidi Tegaskan RKPD Harus Berorientasi Kepada Pembangunan yang Inklusif

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Muhidi menegaskan bahwa program pembangunan harus mengakomodir kebutuhan kelompok disabilitas. DPRD akan mengawal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027 untuk memastikan hal tersebut.

Muhidi menegaskan komitmen tersebut saat pertemuan dengan kelompok disabilitas usai menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

RKPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2027, Rabu (8/4/2026). Menurutnya, RKPD tahun 2027 mengusung tiga fokus utama, salah satunya adalah inklusi sosial. Dua fokus lainnya adalah akselerasi transformasi ekonomi dan penguatan ketahanan pangan.

"Aspirasi yang disampaikan akan menjadi perhatian, DPRD akan mengawal penyusunan RKPD tahun 2027 untuk memastikan rancangan program pembangunan daerah telah mengakomodir kepentingan

seluruh masyarakat termasuk kebutuhan kelompok disabilitas," tegas Muhidi.

Dia menambahkan, inklusivitas pembangunan memberikan rasa adil karena seluruh masyarakat berhak mendapatkan manfaat yang sama dari pembangunan. Untuk itu, DPRD akan mengawal penyusunan RKPD agar memperhatikan aspek keadilan sosial dan inklusivitas, di samping perhatian terhadap upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. P

Terima Audiensi Mahasiswa

Doni Harsiva Yandra Dorong Aksi Nyata Lawan Narkoba dan LGBT



Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Doni Harsiva Yandra mendorong pihak terkait untuk mengambil langkah nyata dalam pemberantasan narkoba dan fenomena penyimpangan perilaku seks atau LGBT serta meningkatkan upaya pencegahan gizi buruk (stunting). Doni menegaskan, tidak ada ruang untuk menganggap sepele persoalan itu karena situasinya sudah berada pada titik yang mengkhawatirkan.

Hal itu ditegaskan Doni saat menerima audiensi mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Komisariat ISIP dan Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (HIMAPO) Universitas Andalas di Ruang Khusus II DPRD Sumatera Barat, Kamis (30/4/2026).

"Masalah penyalahgunaan dan peredaran narkoba, penyimpangan perilaku sosial dan kenakalan remaja harus ditangani serius karena sudah dalam kondisi sangat mengkhawatirkan," tegasnya.

Dalam audiensi tersebut, mahasiswa menyoroti persoalan meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba, berkembangnya fenomena LGBT, serta tingginya kasus gizi buruk di Sumatera Barat. Mahasiswa menilai, persoalan tersebut merupakan ancaman serius terhadap kehidupan generasi bangsa.

Menurut Doni, narkoba merupakan ancaman nyata yang bisa merusak masa depan generasi bangsa. Narkoba tidak saja merusak fisik namun

lebih parah dari itu adalah membuat kerusakan pikiran dan mental yang akan menurunkan kualitas sumber daya manusia di masa depan.

"Perlindungan generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkoba ini harus lebih ditingkatkan, jangan sampai merusak kualitas sumber daya manusia sehingga menimbulkan kehancuran bagi masa depan bangsa," tegasnya.

Selanjutnya, persoalan LGBT menurut Doni adalah fenomena sosial yang perlu direspon melalui pendekatan edukatif. Fenomena itu juga memberikan dampak negatif kepada masa depan generasi muda yang perlu ditindaklanjuti secara teliti dan hati-hati.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumatera Barat itu menambahkan, tidak kalah dari dampak narkoba dan LGBT, stunting juga menjadi ancaman bagi kelangsungan generasi. Gizi buruk memberikan dampak kepada menurunnya kualitas kesehatan, mengganggu tumbuh kembang anak secara fisik dan mental.

"Kualitas generasi masa depan ditentukan oleh tindakan kita saat ini. Narkoba, LGBT, gizi buruk, merupakan ancaman yang memberikan dampak sangat besar bagi kualitas generasi yang harus menjadi perhatian serius," tegasnya.

Dia menambahkan, seluruh unsur baik pemerintah, masyarakat, dan lainnya memiliki tanggung jawab untuk mencegah secara bersama-sama. Termasuk kalangan mahasiswa, yang merupakan cikal bakal pemimpin di masa depan, hendaknya turut terlibat aktif dalam upaya pencegahan tersebut.

Sebagai langkah lanjutan, Doni menekankan pentingnya upaya konkret dan terukur dalam menekan berbagai persoalan tersebut. Ia mendorong penguatan edukasi di lingkungan pendidikan, pencegahan narkoba secara masif, serta percepatan penanganan stunting.

Ia juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar setiap langkah yang diambil berjalan efektif dan berkelanjutan.

"Ini tidak bisa ditunda. Harus ada langkah nyata, terukur, dan berkelanjutan agar generasi muda kita benar-benar terlindungi," tutupnya. T